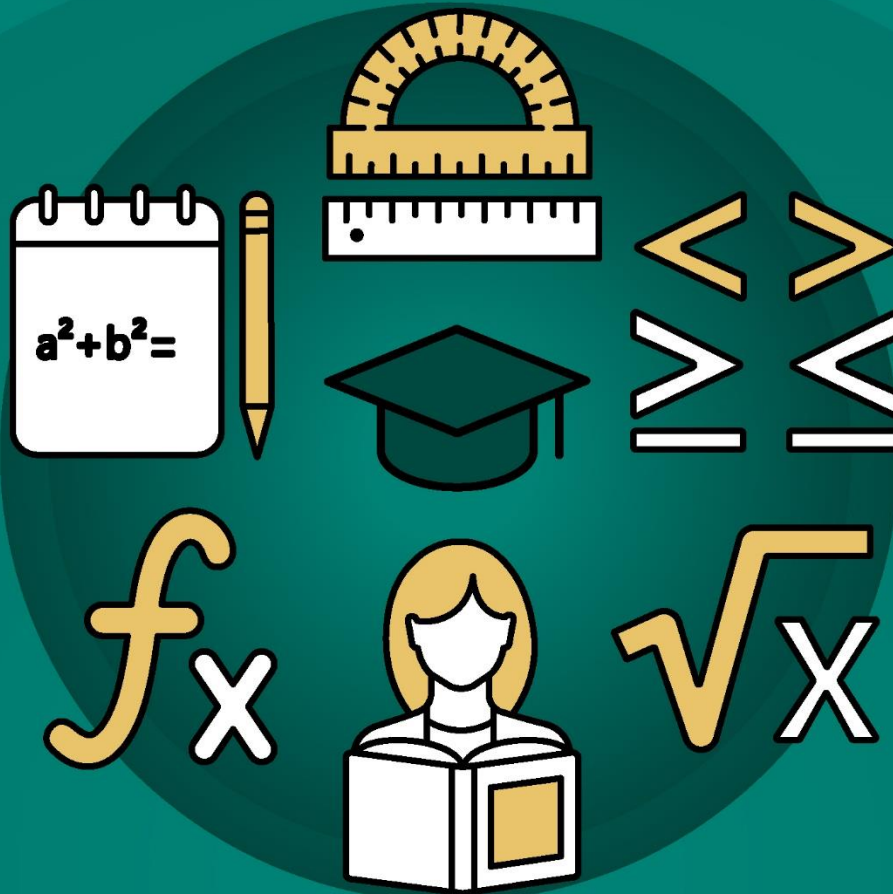




ICONS
NUSANTARA
gateway to success

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO
DI BIDANG PENDIDIKAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
2.1. Tinjauan Teori.....	10
2.1.1 Monitoring Kebijakan.....	12
2.1.2 Evaluasi Kebijakan	14
2.2 Definisi Konseptual	16
2.3 Definisi Operasional	18
BAB III METODE KAJIAN	19
3.1. Jenis Kajian.....	19
3.2. Subjek dan Objek Kajian	19
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.4. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Bidang Pendidikan.....	24
4.1.1. Realisasi Tujuan Pembangunan Pemkab Mojokerto dalam IPM.....	24
4.1.2. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Partisipasi Anak Pada Layanan Pendidikan PAUD	30
4.1.3. Sasaran Strategis 2: Partisipasi Anak Pada Layanan Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama.....	32
4.1.4. Sasaran Strategis 3: Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar Pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan	34
4.1.5. Sasaran Strategis 4: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.....	37
4.1.5.1. Nilai RB Perangkat Daerah.....	37
4.1.5.2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	39
4.1.5.3. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	40



4.1.5.4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	42
4.1.5.5. IP ASN Dinas Pendidikan	43
4.1.6. Sasaran Strategis 5: Pembangunan Inovasi Daerah	45
4.2. Capaian Program Prioritas Bupati	48
4.2.1. Mojokerto Maju	48
4.2.1.1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Serta Kualitas Pendidik	48
4.2.1.2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dari Kualitas Pendidik	55
4.2.2. Mojokerto Adil.....	58
4.2.2.1. Pemberian Insentif Guru TPQ dan Guru Swasta	59
4.2.2.2. Pemberian Kuota Internet Gratis Bagi Siswa dan Guru Selama Pandemi Covid-19.....	60
4.2.2.3. Biaya Sekolah Gratis Bagi Pelajar Tingkat Dasar dan Menengah.....	63
4.2.2.4. Peningkatan Infrastruktur Rumah Ibadah dan Tempat Pendidikan Agama	66
4.2.3. Mojokerto Makmur.....	67
4.2.3.1 Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Rekomendasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan-Sasaran-Indikator Kinerja Dispindik Kab.Mojokerto	4
Tabel 2.	Program Prioritas Bupati Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2024	6
Tabel 3.	Definisi Operasional Kajian	18
Tabel 4.	Teknik Pengumpulan Data	21



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan IPM Kab. Mojokerto Tahun 2016-2020	3
Grafik 2.	Perkembangan IPM Kab. Mojokerto Tahun 2021-2023	25
Grafik 3.	Indikator Harapan Lama Sekolah Kab.Mojokerto	27
Grafik 4.	Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kab.Mojokerto	28
Grafik 5.	Indikator APK PAUD	30
Grafik 6.	Indikator APK SD dan SMP	33
Grafik 7.	APK Kesetaraan	35
Grafik 8.	Nilai RB Perangkat Daerah	37
Grafik 9.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	39
Grafik 10.	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	40
Grafik 11.	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	42
Grafik 12.	IP ASN Dinas Pendidikan	43
Grafik 13.	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	46
Grafik 14.	Sekolah Pendidikan SD / MI dengan Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	49
Grafik 15.	Sekolah Pendidikan SMP / MTs dan SMA / SMK / MA dengan Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	50
Grafik 16.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	56
Grafik 17.	Pemberian Insentif Guru TPQ	59
Grafik 18.	Pemberian Kuota Internet Untuk Siswa	60
Grafik 19.	Pemberian Kuota Internet Guru untuk Tidak Mampu	61
Grafik 20.	Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan 2022-2023	63
Grafik 21.	Total Anggaran Beasiswa Pendidikan Tahun 2022	64
Grafik 22.	Total Anggaran Beasiswa Pendidikan Tahun 2023	64
Grafik 23.	Dana Infrastruktur Keagamaan	66
Grafik 24.	Realisasi Anggaran Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi	68
Grafik 25.	Rincian Realisasi Anggaran Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu Tahun 2022	69
Grafik 26.	Rincian Realisasi Anggaran Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu Tahun 2023	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	<i>The Process of Integrated Analysis</i>	11
Gambar 2.	Skema Pendekatan Monitoring Kebijakan	13
Gambar 3.	Pendekatan dan Teknik Evaluasi Kebijakan	15
Gambar 4.	Headline Berita Proyek Rehab Sekolah Rampung Mojokerto	52
Gambar 5.	Headline Berita Proyek Rehab Sekolah Rampung Mojokerto	53
Gambar 6.	Headline Berita Perbaikan Infrastruktur Sekolah	53
Gambar 7.	Headline Berita Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan, 12 Lembaga Pendidikan Mojokerto Bakal Direnovasi	54
Gambar 8.	Headline Berita Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan, 12 Lembaga Pendidikan Mojokerto Bakal Direnovasi	55
Gambar 9.	Orientasi 210 Tenaga Pendidik PPPK Kabupaten Mojokerto	57
Gambar 10.	Bupati Ikfina Hadiri Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana pendidikan menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan (Purba, 2010; Ridwan, 2016; Taufiqurokhman et al., 2023). Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, tetapi juga sebagai pendorong utama peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Maki et al., 2022; Zulyanto, 2022). Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Pentingnya evaluasi kinerja bidang pendidikan tidak terlepas dari amanat konstitusi dan berbagai regulasi terkait. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar sebagai prioritas utama. Lebih lanjut, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berkeadilan. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan di tingkat daerah, termasuk penyusunan kebijakan dan alokasi sumber daya yang mendukung.

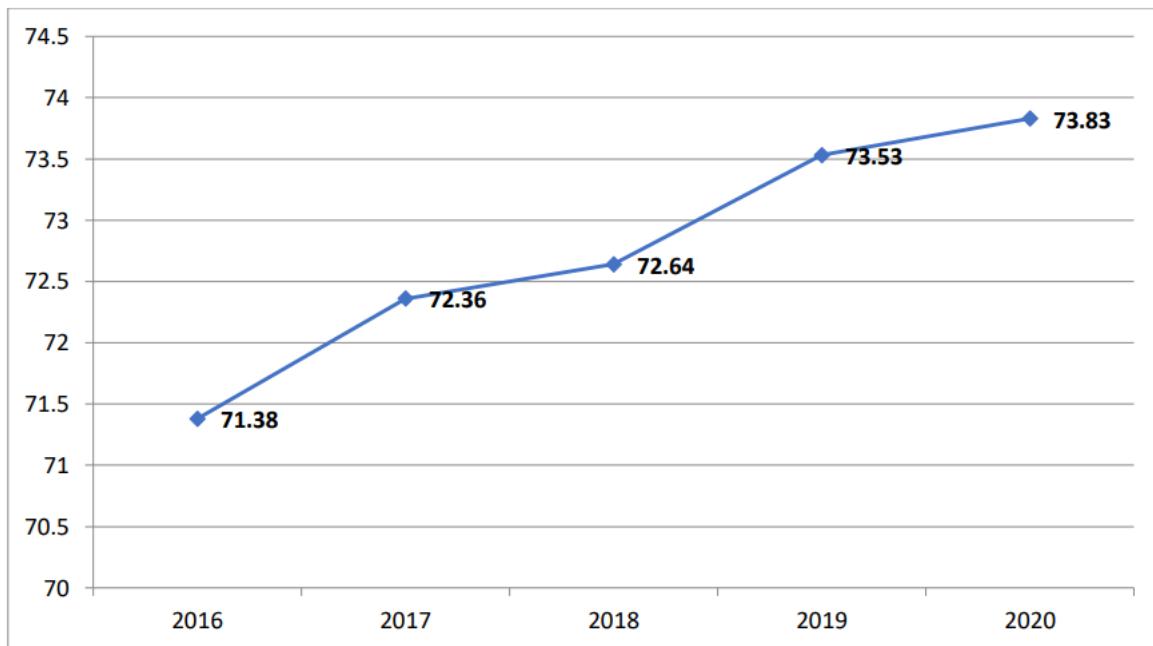
Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, pemerintah daerah telah berupaya menjalankan berbagai program strategis, seperti peningkatan sarana prasarana pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, dan pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu. Namun, masih diperlukan evaluasi yang mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini menjadi penting untuk mengukur efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Bupati Mojokerto memiliki kewajiban yang diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem



Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan secara optimal di wilayahnya. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan tolok ukur bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia.

Pada periode sebelumnya, pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) telah melaksanakan berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Terutama dalam upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum, tingkat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu Kabupaten/Kota dapat diukur melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Untuk menjaga relevansi pengukuran IPM, UNDP telah memperbarui metodologi dan komponen yang digunakan dalam penghitungan indeks ini. Pembaruan tersebut bertujuan menciptakan indeks komposit yang lebih sesuai dalam mengukur pembangunan manusia. Salah satu perubahan signifikan terdapat pada indikator dimensi pengetahuan/pendidikan, di mana angka melek huruf yang dianggap kurang relevan digantikan oleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021). Berikut adalah perkembangan angka IPM Kabupaten Mojokerto berdasarkan metodologi penghitungan yang baru, sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini:



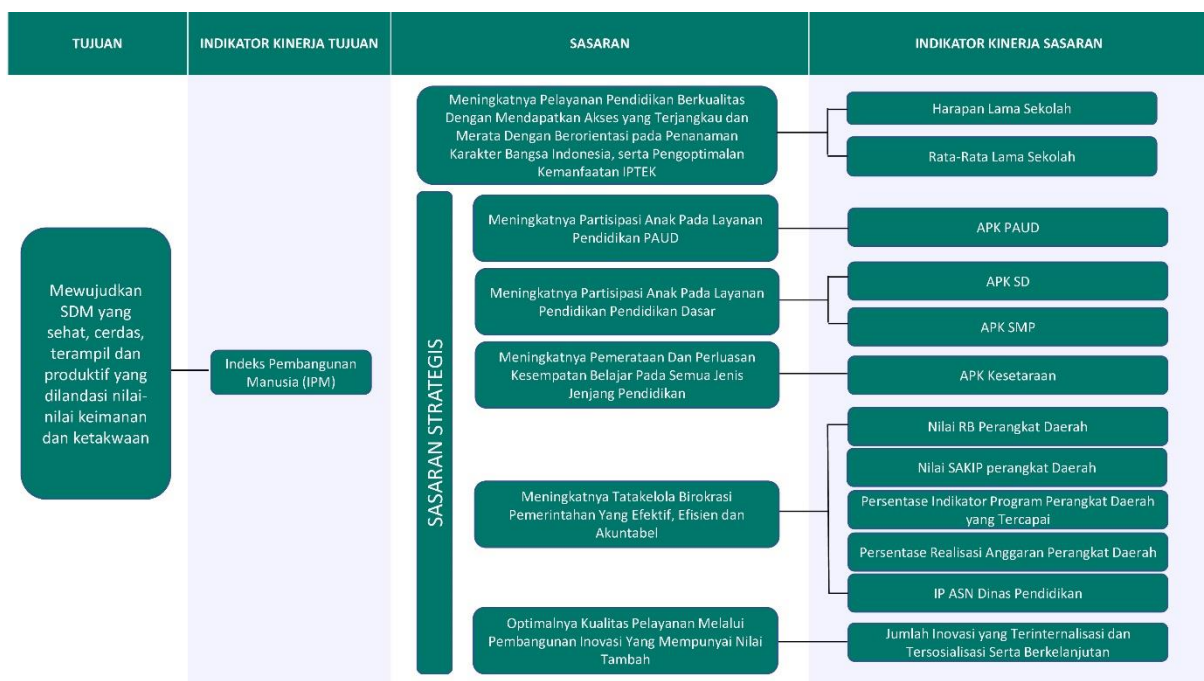
Grafik 1. Perkembangan IPM Kab. Mojokerto Tahun 2016-2020 (BPS Kabupaten Mojokerto, 2021)

Grafik di atas menggambarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016 hingga 2020. Secara keseluruhan, terlihat adanya tren peningkatan IPM setiap tahunnya yang menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan berbagai program strategis, terutama di sektor pendidikan. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan signifikan pada dimensi-dimensi utama IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang didukung oleh implementasi kebijakan relevan dan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tren ini juga menunjukkan konsistensi pemerintah dalam berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Tren peningkatan IPM yang konsisten dari tahun ke tahun menjadi indikator nyata keberhasilan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Capaian ini tidak hanya menunjukkan efektivitas program yang telah dijalankan sebelumnya, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan dan program strategis di masa mendatang. Melalui pendekatan yang terintegrasi, pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berkomitmen untuk mengoptimalkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama dalam mendukung pengembangan kualitas manusia secara berkelanjutan, seiring dengan upaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di era yang semakin kompleks.



Untuk mendukung keberlanjutan pencapaian tersebut, pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan berbagai indikator capaian strategis yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Perlu menjadi catatan bahwa penelitian ini fokus memantau kinerja Pemerintah Mojokerto di bidang pendidikan pada tahun 2021-2023 (Lihat metode kajian bab III). Penelitian ini memantau indikator-indikator utama yang meliputi peningkatan akses pendidikan, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan program-program strategis yang mendukung peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Peneliti juga melakukan penyesuaian dengan menggabungkan laporan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Laporan Instansi Kinerja Pemerintah (LKIP) dalam penyusunan indikator dan sasaran yang dievaluasi dalam penelitian ini. Alur tujuan, indikator, dan sasaran yang telah peneliti susun mengacu pada RPJMD, Renstra, LKJIP, dan LKIP tertuang dalam tabel 1. RPJMD dan laporan-laporan lainnya menjadi sumber data yang hanya diambil dalam jangka tiga tahun, dari 2021 sampai 2023 (Lihat metode kajian bab III).



Tabel 1. Tujuan-Sasaran-Indikator Kinerja Dispendik Kab.Mojokerto (Dispendik Kab. Mojokerto, 2020, 2024)

Tabel di atas menyajikan alur tujuan, indikator, sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto



Tahun 2021-2026. Tujuan utamanya adalah mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Tujuan tersebut diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kinerja utama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran strategis yang dirumuskan meliputi peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas dengan akses yang merata, peningkatan partisipasi anak pada layanan pendidikan (PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan), serta pemerataan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan. Selain itu, terdapat sasaran peningkatan tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel, serta optimalisasi pelayanan melalui inovasi yang memiliki nilai tambah. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur. Misalnya, indikator kinerja untuk sasaran peningkatan layanan pendidikan berkualitas adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, indikator lain mencakup Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan, serta indikator tata kelola seperti nilai reformasi birokrasi, nilai SAKIP perangkat daerah, dan persentase realisasi anggaran. Pemetaan tujuan, indikator, sasaran, dan kinerja ini menunjukkan upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendidikan dalam memastikan perencanaan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan sekaligus mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Selain memantau capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, penelitian ini juga akan mengkaji implementasi program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh Bupati Ikfina Fahmawati. Pada masa Bupati Ikfina Fahmawati sejak 2021, program prioritas telah dirancang untuk mendukung peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga implementasi inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di Mojokerto. Rencana program prioritas tersebut mencakup sejumlah target strategis, seperti peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), pengurangan angka putus sekolah, dan penguatan mutu pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana pendidikan agar tepat sasaran, melalui upaya optimalisasi anggaran yang mendukung program beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, penerapan konsep pendidikan inklusif dan ramah anak menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan (Kemdikbud, 2024).



Pada masa kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati, Kabupaten Mojokerto menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunannya. Upaya peningkatan kualitas pendidikan diwujudkan melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, terampil, dan berdaya saing yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Selain itu, Bupati Ikfina juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik, seperti yang terlihat dalam bimbingan teknis bagi Kepala Pos PAUD untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto terus meningkat, sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Sasaran	Tujuan	Indikator
Mojokerto Maju	Mojokerto Cerdas	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik• Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
Mojokerto Adil	Mojokerto Cerdas	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Insentif Guru TPQ dan Guru Swasta• Biaya Sekolah Gratis Bagi Pelajar Tingkat Dasar Dan Menengah• Pemberian Kuota Internet Gratis Bagi Siswa dan Guru Selama Pandemi Covid-19• Peningkatan Infrastruktur Rumah Ibadah dan Tempat Pendidikan Agama
Mojokerto Makmur	Mojokerto Cerdas	<ul style="list-style-type: none">• Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu

Tabel 2. Program Prioritas Bupati Kabupaten Mojokerto Periode 2021-2024 (Bappeda Kab Mojokerto, 2020)

Dalam kerangka pelaksanaan rencana program prioritas ini, evaluasi dan monitoring menjadi elemen kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan program di sektor pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi program sejalan dengan visi dan misi Bupati Ikfina, serta mengidentifikasi secara umum kendala yang menghambat pencapaian target. Di sisi lain, monitoring berfungsi untuk mengawasi



pelaksanaan program secara berkesinambungan, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Laporan ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realisasi program prioritas di sektor pendidikan selama periode kepemimpinan Bupati Ikfina. Melalui analisis berbasis data dan fakta, laporan ini akan mengidentifikasi capaian utama, hambatan yang dihadapi, dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya menjadi alat untuk menilai kinerja, tetapi juga sebagai pijakan untuk perbaikan dan pengambilan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang. Melalui laporan evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih rinci dan spesifik mengenai kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Hasil evaluasi ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan di masa depan, sehingga pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan benar-benar dapat terwujud sesuai dengan amanat konstitusi dan visi pembangunan daerah.

Penelitian ini fokus pada monitoring dan evaluasi capaian kinerja di sektor pendidikan. Dalam konteks sektor pendidikan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 (Peneliti hanya mengambil data dari 2021-2023). Sektor ini memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mencapai tujuan ini melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas pendidik, serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pencapaian sektor pendidikan dalam kajian ini diukur melalui berbagai indikator, seperti peningkatan IPM, pengelolaan pendidikan yang lebih baik, serta pemberdayaan tenaga pendidik.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi program pembangunan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021-2023 bidang Pendidikan. Maka, peneliti membatasi lingkup kajian ini dalam pengamatan tahun 2021-2023 dan fokus pada bidang pendidikan. Pendekatan kajian yang dilakukan akan mengacu pada RPJMD dan Renstra Dispendik Kab. Mojokerto. Analisis mencakup pencapaian program peningkatan aksesibilitas pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah (APS), serta upaya pengurangan angka putus sekolah. Selain itu, kualitas pendidikan dievaluasi melalui indikator seperti rasio



guru terhadap siswa, tingkat kompetensi tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Hasil dari analisis sektor pendidikan diharapkan tidak hanya memberikan gambaran tingkat ketercapaian target pembangunan hingga tahun 2023 tetapi juga menjadi masukan strategis bagi evaluasi kebijakan dan perbaikan program pembangunan pendidikan di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dalam pendahuluan, kajian ini merumuskan tiga poin pada penelitian ini. Adapun poinnya sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi program prioritas sektor pendidikan pada tahun 2021-2023?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program prioritas sektor pendidikan di Kabupaten Mojokerto?
3. Apa saja langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program prioritas pendidikan di Kabupaten Mojokerto pada masa mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari kajian yang dilakukan dalam memonitoring dan evaluasi capaian kinerja sektor pendidikan sebagai berikut:

1. Mengetahui ketercapaian target kinerja sektor pendidikan Pemkab Mojokerto tahun 2021-2023.
2. Mengukur sejauh mana capaian indikator-indikator kinerja pendidikan dalam tahun 2021-2023, seperti angka partisipasi sekolah, tingkat kelulusan, kualitas pembelajaran, dan aksesibilitas pendidikan telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Memahami dampak dari kebijakan dan program-program pendidikan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk peningkatan kebijakan selanjutnya.
4. Memberikan kajian berbasis data yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan.



1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari kajian yang dilakukan dalam memonitoring dan evaluasi capaian sektor pendidikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto setidaknya memperoleh tiga poin manfaat, di antaranya:

1. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Mendukung terwujudnya akuntabilitas publik melalui pengukuran kinerja yang transparan dan terukur.
3. Referensi bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.



BAB II

KERANGKA TEORI

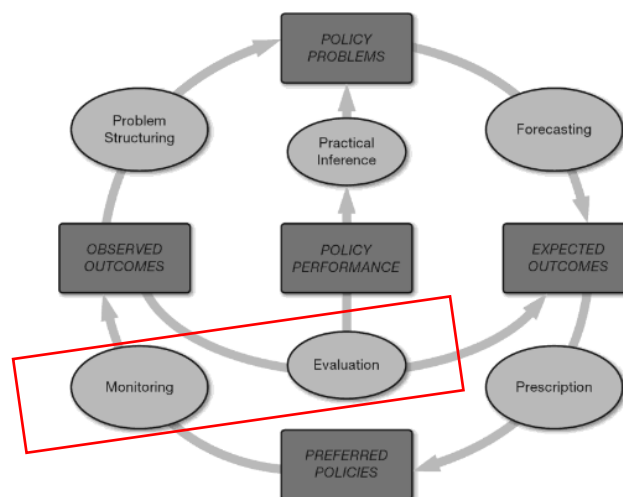
2.1. Tinjauan Teori

Monitoring dan evaluasi (monev) kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak yang dihasilkan dari adanya kebijakan (Dunn, 1991). Monev kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, monev kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Merujuk pada pernyataan Dunn istilah monev mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Monev memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, monev memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik (Ripley & Franklin, 1986). Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbuangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target (Magriasti, 2011). Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberi sumbuangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Hamiruddin, 2021).

Monev mempunyai dua aspek yang saling berhubungan, penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan (Andhika, 2017). Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluative. Namun, banyak aktivitas yang diterangkan sebagai evaluasi dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non evaluatif atau aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan faktual ketimbang tuntutan evaluatif. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk mengevaluasi suatu kebijakan publik. Berangkat dari hal tersebut, terdapat alur yang perlu dilalui sebelum melakukan monev kebijakan yang dapat dilihat dari siklus kebijakan



publik. Menurut Dunn siklus kebijakan publik merupakan suatu pendekatan/kerangka kerja yang dipakai untuk menjelaskan tahapan dalam proses pembuatan, implementasi hingga monev kebijakan publik. Adapun siklus kebijakan publik tervisualisasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. *The Process of Integrated Analysis* (Dunn, 1991)

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui sejumlah tahapan kebijakan publik yang terus berputar (*cycle of policy*) dan menuntut pemerintah untuk terus memonitoring dan evaluasi kebijakannya agar kebijakan yang sudah diterapkan dapat sesuai dengan kebutuhan publik (Dunn, 1991). Merujuk pada gambar diatas tahap pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah atau perhatian pemerintah dalam melihat problem yang muncul dari berbagai sumber seperti adanya konflik, komplain, keluhan masyarakat dan sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah perumusan kebijakan yakni proses menganalisis dan mengembangkan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang telah teridentifikasi ditahap pertama. Selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan yakni tahap melibatkan proses pengambilan keputusan (*decision making*) oleh aktor pembuat kebijakan. Tahap selanjutnya adalah pengimplementasian kebijakan mencakup kegiatan-kegiatan seperti pengorganisasian sumber daya, penetapan struktur organisasi, pengalokasian budget, pelibatan aktor dan lembaga pelaksana yang tepat. Lalu tahapan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi kebijakan yang merupakan tahapan penting dalam menilai kebijakan yang diterapkan sudah berdampak positif atau sebaliknya (Neo & Chen, 2014).



2.1.1 Monitoring Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan dari ketepatan perumusan kebijakan yang akan diimplementasikan, melainkan turut dipengaruhi oleh monitoring kebijakan yang dapat dijadikan pedoman untuk digunakan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya. Monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Narasi tersebut sependapat dengan William Dunn yang menjelaskan bahwa pemantauan merupakan cara untuk membuat pernyataan yang bersifat penjelasan tentang tindakan kebijakan pada masa lalu dan pada masa sekarang. Monitoring kebijakan bertujuan untuk menetapkan premis faktual tentang kebijakan publik. Dalam monitoring kebijakan dapat dibedakan menjadi dua jenis akibat yaitu luaran yang dihasilkan dari kebijakan (Output) dan Dampak dari adanya penerapan kebijakan tersebut (Impact).

Luaran kebijakan merupakan barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima. Sedangkan dampak adalah perubahan nyata pada sikap atau tingkah laku yang dihasilkan dari adanya kebijakan. Dalam monitoring luaran dan dampak kebijakan, harus dipahami bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. Kelompok sasaran merupakan individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau program. Sedangkan penerima adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan pemerintah. Kelompok sasaran maupun kelompok penerima pada masa yang akan datang belum tentu menjadi kelompok sasaran dan penerima ketika pemerintah telah memiliki kebijakan yang berbeda. Hal ini menurut Dunn untuk memperhitungkan secara baik luaran dan dampak perlu memperhatikan dua tujuan utama yaitu regulasi dan alokasi.

Tindakan regulatif dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu, sedangkan tindakan alokatif merupakan tindakan yang membutuhkan masukan berupa biaya, waktu, personil dan ketersediaan alat. Tindakan regulatif dan alokatif memberikan dampak berupa distributif maupun retributif. Tindakan kebijakan dapat dipilah lagi menjadi masukan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan merupakan sumber daya waktu, biaya, personil, alat dan material yang dipakai untuk menghasilkan luaran dan dampak. Pendekatan yang dapat digunakan dalam monitoring salah satunya sistensis riset dan praktik. Dalam sistensis riset dan praktik merupakan pendekatan pemantauan yang menerapkan kompilasi, perbandingan dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari



implementasi kebijakan publik pada masa lalu. Pendekatan ini telah digunakan untuk mensintesis informasi dalam sejumlah bidang kebijakan, mulai dari persoalan kesejahteraan, pertanian, pendidikan hingga kebijakan pelayanan pemerintahan.

Pendekatan ini juga telah diaplikasikan dalam mengkaji kualitas dari kajian tentang proses dan hasil kebijakan. Dalam sintesis riset dan praktik terdapat dua sumber informasi yaitu studi kasus tentang formulasi dan implementasi kebijakan dan laporan kajian yang mengupas masalah hubungan antara tindakan dan hasil kebijakan. Dalam studi kasus, metode ini merujuk pada seperangkat prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjelaskan variasi yang ditemui dalam mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan. Ketika sintesis riset dan praktik diterapkan terhadap laporan kajian yang telah tersedia, maka harus didasarkan pada survei riset, sintesis riset atau sintesis evaluasi yakni suatu prosedur yang digunakan untuk membandingkan dan mengkaji hasil-hasil kajian tentang tindakan dan hasil kebijakan. Adapun skema dan indikator-indikator yang dalam pendekatan monitoring ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Skema Pendekatan Monitoring Kebijakan (Dunn, 1991)

Metode sintesis riset memiliki beberapa keuntungan, Pertama, metode survei kasus dan metode survei riset merupakan cara yang secara komprehensif efisien untuk menghimpun dan menelaah laporan kasus dan riset tentang implementasi kebijakan yang terus membengkak. Sintesis riset dan praktik memungkinkan analisis untuk mengkaji secara sistematis dan kritis perbedaan yang terdapat di dalam berbagai generalisasi empiris dan implikasinya. Kedua, metode survei kasus merupakan salah satu cara untuk mengungkap dimensi yang lain dari proses kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan. Generalisasi proses kebijakan dapat digunakan untuk mendukung argumen kasus paralel dan analogi, misalnya dengan menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilakukan di bawah kondisi yang sama memiliki hasil serupa. Ketiga, metode survei riset merupakan cara yang baik untuk mengkaji kondisi sosial objektif maupun subjektif. Metode ini murah dan efektif untuk menggali informasi tentang persepsi subjektif tentang proses kebijakan di antara para penentu kebijakan.



2.1.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dipadankan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian. Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini mengandung arti pulaa, bahwa suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan yang dibuat telah jelas dan dapat diatasi. Aktivitas evaluasi seringkali disamaartikan dengan kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan berbeda dengan aktivitas evaluasi kebijakan. Pemantauan utamanya menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, seddangkan evaluasi memfokuskan diri pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan.

Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan diantaranya. Pertama, tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Kedua, evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana dan target kebijakan. Ketiga, prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Keempat, mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan. Mengacu pada William Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya. Pertama, fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program. Oleh karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, maka evaluasi juga berkenaan dengan prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua, interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung pada fakta dan nilai. Untuk memastikan bahwa kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang tertinggi.

Diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau masyarakat; tetapi juga harus didukung oleh sejumlah bukti bahwa kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Ketiga, orientasi masa kini dan masa lalu. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif. Evaluasi lebih diarahkan pada hasil sekarang dan pada masa lalu daripada hasil di



masa mendatang. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Keempat, dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda. Nilai dipandang memiliki tujuan sekaligus cara. Dalam hal ini, evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkaitan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai sesuatu yang intrinsik maupun ekstrinsik. Nilai-nilai ditata dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling tergantung antara tujuandan sasaran. Evaluasi kebijakan memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik tentang apa yang terjadi dalam suatu program/praktik/teknologi berkaitan dengan suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan juga memandu bagaimana evaluasi dilakukan.

Evaluasi kebijakan memuat sejumlah aturan dan prinsip yang menentukan kelompok atau organisasi menggunakan panduan keputusan dan tindakan ketika melakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dipandang penting, karena evaluasi bernilai sebagai peran penanda dengan tipe-tipe mekanisme yang diperlihatkan. Evaluasi kebijakan merupakan penanda bagi seluruh organisasi dan stakeholder tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Evaluasi juga menginformasikan jenis evaluasi yang harus ditempuh, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya, dan bagaimana seharusnya dilakukan. Evaluasi kebijakan bersifat tertulis, sehingga dengan evaluasi membuat evaluasi akan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat dipahami, karena evaluasi yang dibuat tertulis dapat diketahui oleh publik dan mereka dapat mengkritisi kebijakan setiap saat. Evaluasi yang tertulis juga dapat disimpan dalam arsip baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Adapun sejumlah pendekatan dan teknik evaluasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Pendekatan	Teknik
Evaluasi Semu	<ul style="list-style-type: none">- Sajian Grafik- Tampilan Tabel- Angka Indeks- Analisis Seri Waktu Terinterupsi- Analisis Seri Terkontrol- Analisis Diskontinue Regresi
Evaluasi Formal	<ul style="list-style-type: none">- Pemetaan Sasaran- Klarifikasi Nilai- Kritik Nilai- Pemetaan Hambatan- Analisis Dampak Silang- Diskonting
Evaluasi Keputusan Teoretis	<ul style="list-style-type: none">- Brainstorming- Analisis Argumentasi- Delphi Kebijakan- Analisis Survai Pemakai

Gambar 3. Pendekatan dan Teknik Evaluasi Kebijakan (Dunn, 1991)



Evaluasi kebijakan juga merupakan proses belajar, yakni tentang apa yang dilakukan dan hasilnya dapat digunakan bagi pihak lain untuk membuat kebijakan baru. Mereka juga dapat membandingkan hasil dari evaluasi dengan praktik kebijakan yang sudah dilakukan. Selain sebagaimana dikemukakan Trochim, Dunn mengungkapkan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan publik. Pertama, dan yang terpenting adalah memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu, misalnya peningkatan kualitas pendidikan dan target tertentu (20% disediakan oleh APBN) telah dicapai. Kedua, evaluasi memberi kontribusi kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

Nilai dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam kaitan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas. Dalam menghasilkan informasi kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tabel berikut menginformasikan tipe kriteria dimaksud. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam hal perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi mengenai tidak memadainya kinerja kebijakan, dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi juga dapat berkontribusi pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain.

2.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual membantu dalam memahami variabel dalam kerangka kerja kajian, yang dalam konteks ini mengacu pada indikator-indikator strategis dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Penelitian ini memantau indikator utama yang mencakup peningkatan akses pendidikan, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan



program-program strategis untuk mendukung kualitas dan relevansi pendidikan. Berikut adalah definisi konseptual yang digunakan dalam kajian ini:

1. Input

Input mengacu pada aktivitas monitoring dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi poin-poin Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Input ini mencakup sumber daya, kebijakan, dan strategi awal yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program pendidikan.

2. Proses

Proses mencakup aktivitas monitoring dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk menilai indikator dalam IKU serta aspek, fokus, bidang urusan, dan indikator kinerja pembangunan dalam IKD. Proses ini juga melibatkan analisis terhadap target tahunan yang telah ditetapkan dalam capaian kinerja urusan pendidikan, sesuai dengan arahan RPJMD, Renstra, dan dokumen perencanaan lainnya.

3. Output

Output adalah hasil langsung dari aktivitas monitoring dan evaluasi, yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian target tahunan pada IKU dan IKD. Output ini mencakup penilaian terhadap keberhasilan program dan kebijakan pendidikan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam kerangka kerja pemerintah Kabupaten Mojokerto.

4. Impact

Impact mengacu pada dampak jangka panjang dari implementasi kebijakan dan program pendidikan, yang dilihat dari keberhasilan pencapaian IKU dan IKD. Dampak ini mencerminkan sejauh mana program-program pendidikan di Kabupaten Mojokerto berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Definisi-definisi konseptual ini memberikan kerangka yang terstruktur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD Kab. Mojokerto dan Renstra Dispendik Kab. Mojokerto.



2.3 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan sebagai acuan kerangka kerja kajian dalam menjalankan proses analisis, sehingga cakupannya terbatas dan tidak melebar yang berpotensi menciptakan kajian tanpa batasan akademik. Berikut merupakan definisi operasional dalam kajian ini:

No	Variabel	Indikator
1	Input	a. Regulasi (RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026) (Peneliti hanya mengambil data tahun 2021-2023, Lihat Metode Kajian Bab III) b. Sumber Daya (Alokasi Anggaran dan SDM)
2	Proses	a. Indikator Kinerja Utama b. Indikator Kinerja Daerah
3	Output	a. Data Capaian Pertahun
4	Impact	a. Peningkatan Sektor Pendidikan

Tabel 3. Definisi Operasional Kajian (Diolah Peneliti)



BAB III METODE KAJIAN

3.1. Jenis Kajian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell Creswell (2013) bahwa metode kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Dalam definisi ini terdapat empat elemen utama yang harus diperhatikan: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Dengan demikian, metode kualitatif dapat dipahami sebagai teknik ilmiah untuk memperoleh data terkait suatu objek penelitian dengan tujuan memecahkan permasalahan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama atau *human instrument*. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki pemahaman teoretis dan wawasan yang luas untuk menggali serta menganalisis informasi secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Pendekatan ini juga membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi dan harapan dari subjek yang dikaji.

Proses analisis data dilakukan menggunakan pendekatan induktif, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan temuan langsung dari data yang diperoleh, tanpa dibatasi oleh kerangka teoritis yang telah ada. Hal ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam. Selain itu, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis data yang terkumpul. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat menggambarkan karakteristik subjek secara rinci, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang persepsi dan harapan subjek yang menjadi fokus kajian.

3.2. Subjek dan Objek Kajian

Subjek kajian ini adalah kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan dalam periode 2021–2023. Subjek ini mencakup pelaksanaan kebijakan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah -peneliti membuat alur pikir dalam sebuah tabel mengenai indikator-indikator yang ditetapkan oleh Pemkab Mojokerto dalam bidang pendidikan- sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021–2026. Data dari RPJMD hanya diambil dari tahun 2021-2023. Subjek juga melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten



Mojokerto (Dispendik) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan di sektor pendidikan. Dinas Pendidikan berperan dalam merancang dan melaksanakan program strategis yang meliputi peningkatan akses pendidikan, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan program-program yang mendukung relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Objek kajian ini adalah capaian indikator-indikator pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Lihat Tabel 1 di Latar Belakang). Indikator ini mencakup target capaian tahunan pada berbagai aspek strategis, seperti tingkat aksesibilitas pendidikan, kualitas infrastruktur sekolah, kualifikasi tenaga pendidik, dan tingkat ketercapaian program pendidikan inklusif. Analisis terhadap objek kajian dilakukan dengan mengacu pada data riil capaian dari tahun 2021 hingga 2023, yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dispendik. Melalui analisis ini, kajian bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan di masa mendatang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dirancang secara terstruktur untuk mendukung analisis terhadap variabel-variabel utama yang dirumuskan dalam definisi operasional, meliputi dimensi input, proses, output, dan impact. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid, kredibel, dan relevan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dirancang untuk memperoleh wawasan mendalam tentang hubungan antarvariabel yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Untuk itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang relevan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dan Laporan Kinerja Indikator Pembangunan (LKIP). Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai sumber data untuk memahami indikator capaian, target tahunan, serta pelaksanaan program yang relevan dengan



kebijakan pembangunan pendidikan yang sedang berjalan. Selain itu, peneliti mengumpulkan data penunjang dari media online.

No	Variabel	Indikator	Sumber Data
1	Input	A. Regulasi (RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026) B. Sumber Daya (Alokasi Anggaran dan SDM)	A. RPJMD B. Renstra Dispendik 2021-2026 Kab. Mojokerto (Data hanya diambil dari 2021-2023, Lihat Subjek dan Objek Kajian) C. Data Statistik Kab. Mojokerto
2	Proses	A. Indikator Kinerja Utama B. Indikator Kinerja Daerah	A. RPJMD B. Renstra Dispendik 2021-2026 Kab. Mojokerto (Data hanya diambil dari 2021-2023, Lihat Subjek dan Objek Kajian) C. Data Statistik Kab. Mojokerto
3	Output	A. Data Capaian Pertahun	A. Laporan RPJMD B. LKIP Kab Mojokerto 2022 (Laporan untuk tahun 2021) C. LKJIP Dispendik 2023 (Laporan untuk tahun 2022) D. LKJIP Dispendik 2024 (Laporan untuk tahun 2023) E. Data Statistik Kab. Mojokerto
4	Impact	A. Peningkatan Sektor Pendidikan	A. LKJIP Dispendik 2023 B. LKJIP Dispendik 2024 C. Data Statistik Kab. Mojokerto

Tabel 4. Teknik Pengumpulan Data (Diolah oleh Peneliti)

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu analisis model Miles dan Huberman serta pendekatan metode interaktif. Menurut Miles & Huberman (1992: 16), analisis



terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data primer yang bersumber dari RPJMD Kabupaten Mojokerto, data dari BPS, serta dokumen terkait lainnya akan direduksi sesuai dengan kebutuhan analisis, yang berfokus pada indikator capaian dan target dari sektor pendidikan. Reduksi data ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang relevan dengan pembangunan sektor pendidikan, termasuk analisis terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang telah ditetapkan (Lihat Subjek dan Objek Kajian).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data yang relevan sesuai dengan tujuan kajian. Data yang diperoleh dari dokumen RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, LKPD, BPS, serta dokumen pendukung lainnya akan diorganisasikan berdasarkan kategori variabel input, proses, output, dan impact. Data yang tidak relevan akan dieliminasi untuk memastikan fokus pada indikator-indikator yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang paling penting guna menganalisis capaian dan efektivitas kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah interpretasi. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terkait dengan sektor pendidikan (Lihat Subjek dan Objek Kajian). Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antarvariabel serta mengidentifikasi area yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil berdasarkan pola, temuan, dan hubungan yang muncul dari proses analisis data sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti juga memeriksa validitas dan konsistensi data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan akhir kajian akan mencakup evaluasi terhadap



pencapaian target kinerja di sektor pendidikan, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Mojokerto.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan program prioritas pembangunan menjadi pilar utama dalam upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja di bidang pendidikan tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mendukung percepatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai sasaran strategis. Di sisi lain, capaian program prioritas Bupati Mojokerto menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan infrastruktur, pelayanan publik, dan inovasi kebijakan yang berkelanjutan. Bab ini akan mengulas kinerja Pemkab Mojokerto dalam bidang pendidikan serta capaian program prioritas Bupati yang menjadi tonggak keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut.

4.1. Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui berbagai sasaran strategis, Pemkab Mojokerto berupaya meningkatkan partisipasi anak pada layanan pendidikan, mulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, serta memastikan pemerataan dan perluasan akses belajar di seluruh jenjang pendidikan. Selain itu, upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong inovasi daerah menjadi landasan penting dalam mendukung kualitas pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Subbab ini membahas capaian Pemkab Mojokerto dalam merealisasikan tujuan pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

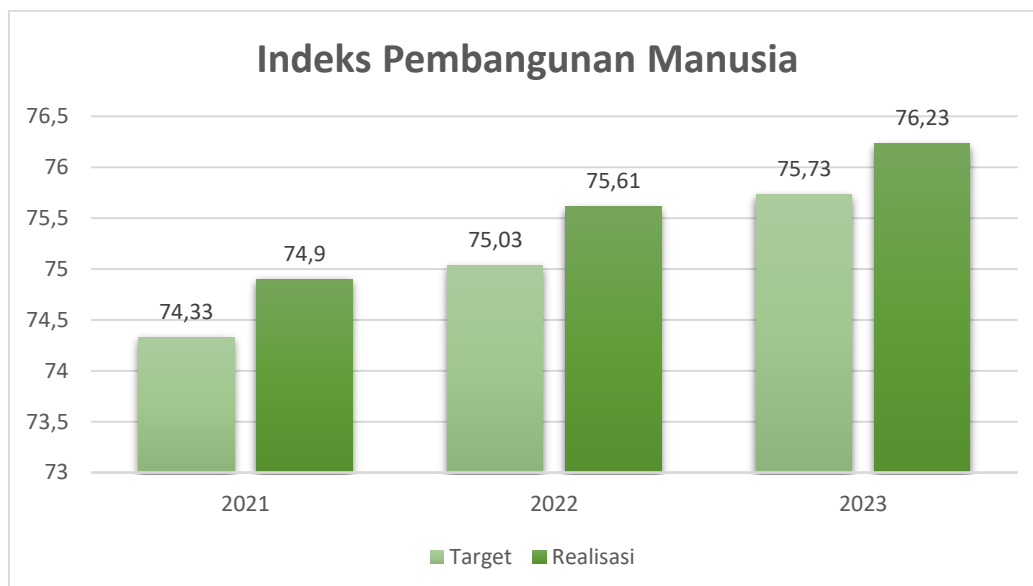
4.1.1. Realisasi Tujuan Pembangunan Pemkab Mojokerto dalam IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, menjadi indikator penting untuk memahami capaian pembangunan manusia. Di Kabupaten Mojokerto, IPM dari tahun 2021 hingga 2023 perlu dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi tren perubahan dan faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi atau pertumbuhannya. Data ini dapat



mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Dalam rencana meningkatkan IPM di Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto memiliki tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Pendidikan Berkualitas Dengan Mendapatkan Akses yang Terjangkau dan Merata Dengan Berorientasi pada Penanaman Karakter Bangsa Indonesia, serta Pengoptimalan Kemanfaatan IPTEK. Dalam konteks pembangunan manusia, tiga indikator utama yakni; Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi tolok ukur esensial yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat secara umum.



Grafik 2. Perkembangan IPM Kab. Mojokerto Tahun 2021-2023 (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023)

Berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik BPS Mojokerto (Grafik 2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021-2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55% per tahun. Percepatan pertumbuhan IPM pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi indikasi positif dari peningkatan kualitas pembangunan manusia di wilayah ini. Semua dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, turut mengalami perbaikan. Khususnya, dimensi umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan IPM, mencerminkan hasil nyata dari upaya perbaikan layanan kesehatan dan

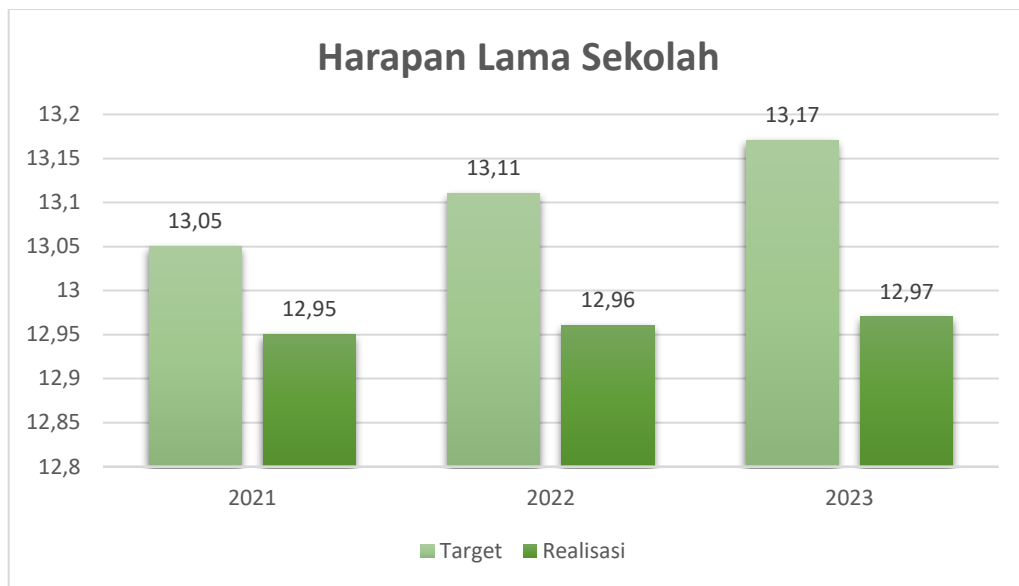


ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Mojokerto semakin terarah dan berkelanjutan.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah, yang mencakup tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dalam kaitannya dengan dimensi pengetahuan, dua indikator utama yang menjadi sasaran adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS mencerminkan ekspektasi terhadap durasi pendidikan yang dapat dicapai oleh anak-anak di suatu wilayah, sedangkan RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini sangat krusial karena peningkatan HLS menunjukkan adanya akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda, sementara peningkatan RLS mencerminkan keberhasilan masa lalu dalam menyediakan pendidikan yang merata. Dalam konteks IPM, keberhasilan meningkatkan HLS dan RLS tidak hanya memperkuat dimensi pengetahuan tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023).

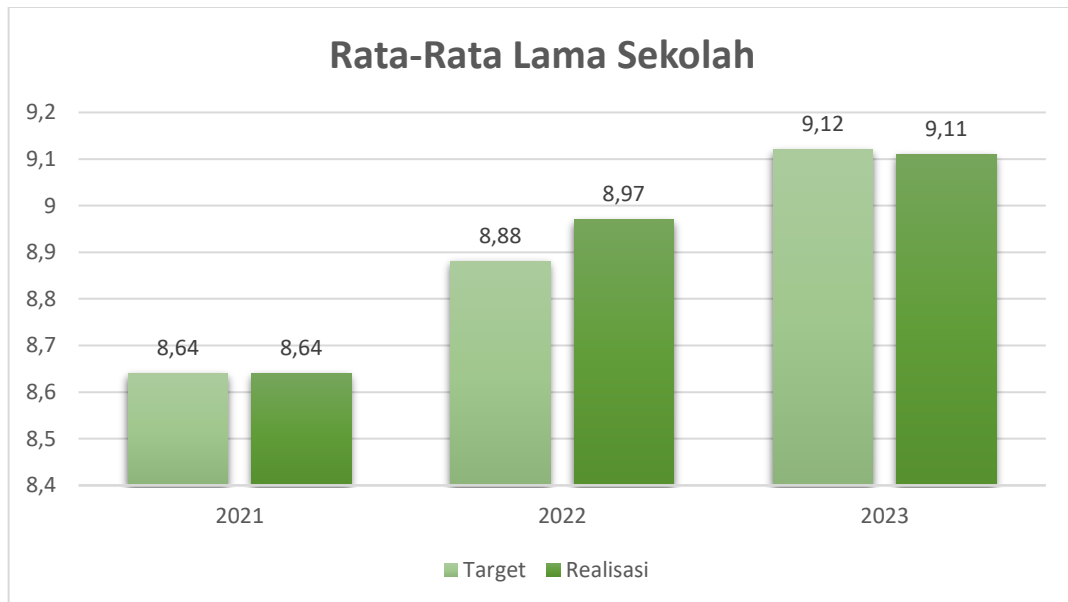
HLS sebagai indikator dari dimensi pendidikan memberikan gambaran tentang ekspektasi lama waktu yang dihabiskan seorang anak untuk mengenyam pendidikan formal. Di era transformasi digital dan tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif, tren HLS dapat menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dalam mempercayai sistem pendidikan di wilayah tersebut.

Selain itu, RLS menjadi cerminan dari realisasi pendidikan masyarakat dewasa yang dapat memberikan gambaran lebih konkret tentang aksesibilitas dan pemerataan pendidikan di masa lalu. Dengan demikian, analisis RLS dapat membantu mengidentifikasi hambatan historis dalam akses pendidikan dan dampaknya pada generasi dewasa saat ini.



Grafik 3. Indikator Harapan Lama Sekolah Kab.Mojokerto (Dispendik Kab. Mojokerto, 2021, 2022, 2023)

Berdasarkan data yang di atas, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan peningkatan selama periode 2021-2023 (Grafik 3). Peningkatan ini mencerminkan adanya progres dalam upaya memperbaiki akses pendidikan di wilayah tersebut, baik dari segi pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, maupun kebijakan yang mendukung kesetaraan pendidikan bagi masyarakat. HLS yang meningkat mengindikasikan bahwa anak-anak di Kabupaten Mojokerto memiliki ekspektasi untuk menikmati durasi pendidikan yang lebih panjang, yang tentunya menjadi sinyal positif bagi perbaikan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Namun, jika ditinjau berdasarkan target yang direncanakan oleh Pemkab Mojokerto, realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan.



Grafik 4. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kab.Mojokerto (Dispendik Kab. Mojokerto, 2021, 2022, 2023)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten di Kabupaten Mojokerto selama periode 2021 hingga 2023 (Grafik 4). Pada tahun 2021, target RLS ditetapkan sebesar 8,64 tahun, dan realisasi berhasil mencapai angka yang sama, yaitu 8,64 tahun, menunjukkan pencapaian yang stabil di awal periode evaluasi. Pada tahun 2022, target meningkat menjadi 8,88 tahun, sementara realisasi berhasil melampaui target dengan pencapaian sebesar 8,97 tahun, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat. Pada tahun 2023, target RLS kembali dinaikkan menjadi 9,12 tahun, tetapi realisasi sedikit berada di bawah target, yakni sebesar 9,11 tahun, dengan selisih hanya 0,01 tahun. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, pencapaian ini tetap mencerminkan peningkatan yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak seragam jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, RPJMD Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2023, tren positif ini tidak berlanjut sepenuhnya, karena realisasi RLS tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat menjadi indikator adanya tantangan atau kendala dalam sektor pendidikan pada tahun tersebut, baik dari sisi implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal yang memengaruhi capaian tersebut.



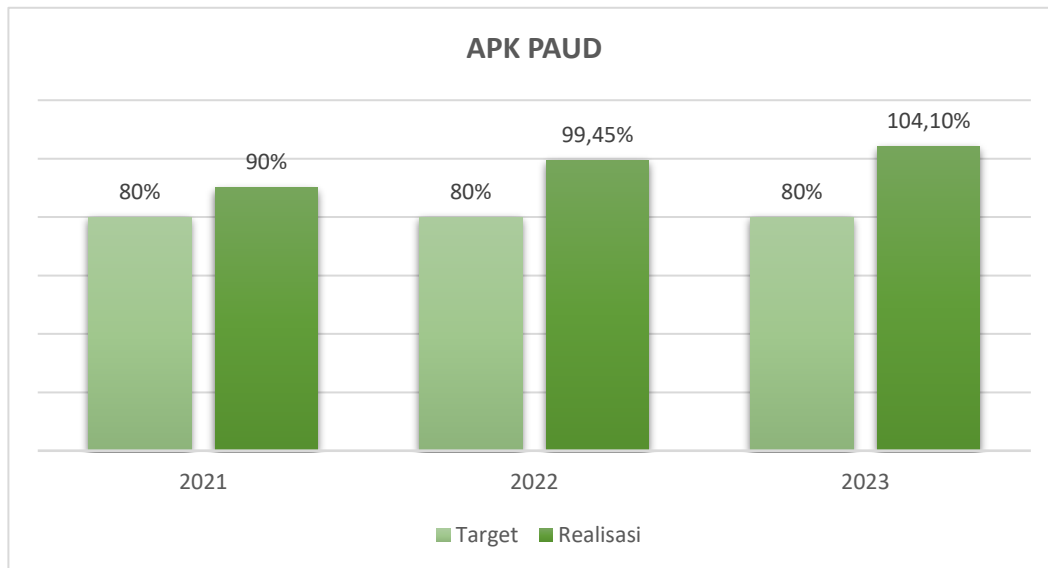
Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam dimensi pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dispendik perlu mengimplementasikan sejumlah langkah strategis. Pertama, Dispendik penting untuk memperkuat akses pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama untuk kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan distribusi sumber daya yang lebih merata diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam hal kualitas pendidikan. Ini akan mendukung peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang lebih optimal, serta menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan yang lebih panjang.

Kedua, untuk mendukung pencapaian target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang lebih tinggi, Pemkab Mojokerto melalui Dispendik perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan penguatan program pelatihan bagi guru, peningkatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih memadai. Pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan RLS, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan IPM yang berkelanjutan.

Ketiga, untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian target yang belum tercapai, Pemkab Mojokerto perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menghambat pencapaian tersebut. Hal ini bisa mencakup analisis terhadap kebijakan pendidikan yang belum efektif atau keterbatasan sumber daya yang ada. Langkah korektif perlu diambil untuk mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada atau merancang kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal.



4.1.2. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Partisipasi Anak Pada Layanan Pendidikan PAUD



Grafik 5. Indikator APK PAUD (Dispendik Kab. Mojokerto, 2021, 2022, 2023)

Berdasarkan data yang dirilis dalam Berita Resmi Statistik oleh BPS Mojokerto, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menunjukkan tren peningkatan secara statistik selama periode 2021 hingga 2023 (Grafik 5). Capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini. Berbagai program yang dilaksanakan, seperti pembangunan infrastruktur PAUD, pelatihan tenaga pendidik, dan kampanye edukasi kepada masyarakat, kemungkinan besar turut berkontribusi pada tren positif ini.

Lebih lanjut, capaian APK PAUD ini tidak hanya menunjukkan peningkatan secara kuantitatif, tetapi juga konsisten memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto untuk periode tersebut. Hal ini menandakan bahwa strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis telah berjalan efektif selama tiga tahun berturut-turut, tanpa adanya deviasi dari sasaran yang telah ditentukan.

Capaian ini tidak hanya penting sebagai indikator keberhasilan dalam konteks RPJMD, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam mendukung agenda nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Meski demikian, keberlanjutan



dan penguatan program-program terkait tetap diperlukan untuk memastikan seluruh anak usia dini di Mojokerto dapat mengakses layanan PAUD secara merata dan berkualitas. Secara keseluruhan, capaian APK PAUD selama 2021-2023 tidak hanya memenuhi, tetapi secara konsisten melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam menyediakan akses layanan pendidikan PAUD yang luas, baik melalui penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan tenaga pendidik, maupun kampanye sosial untuk meningkatkan partisipasi anak pada jenjang PAUD.

Pencapaian yang signifikan dalam APK PAUD di Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, terutama dalam alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan pendidikan anak usia dini. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan berbagai instansi terkait. Sinergi ini memungkinkan implementasi kebijakan yang terarah dan menyeluruh, baik dalam aspek peningkatan akses maupun kualitas layanan pendidikan PAUD. Meskipun capaian APK PAUD secara keseluruhan melebihi target, terdapat kendala yang menghambat pencapaian angka partisipasi pada tingkat yang ideal. Salah satu faktor utamanya adalah pergeseran pola pikir masyarakat. Sebagian besar masyarakat cenderung ingin menyekolahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih cepat (sebelum mencapai usia genap 5 tahun). Fenomena ini berdampak pada penurunan kesesuaian usia anak yang sebenarnya dihitung dalam APK PAUD, sehingga angka partisipasi tidak mencapai titik maksimal sesuai dengan definisi dan indikator yang digunakan (RKPD Mojokerto, 2023).

Melalui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, Kabupaten Mojokerto telah berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam APK PAUD. Namun, kedepannya diperlukan pendekatan yang lebih adaptif untuk mengatasi hambatan budaya dan pola pikir masyarakat, serta memastikan bahwa pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung keberlanjutan pencapaian peningkatan APK PAUD, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih menyeluruh. Salah satunya adalah melalui penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat dengan mengadakan kampanye sosial berkelanjutan yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemimpin lokal sebagai agen perubahan. Selain itu, peningkatan fasilitas dan kualitas layanan PAUD juga menjadi prioritas,



termasuk melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas yang mendukung pembelajaran berkualitas. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga perlu menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung pendanaan, inovasi program, serta memperluas akses layanan PAUD. Kebijakan insentif seperti subsidi biaya pendidikan atau penyediaan perlengkapan sekolah gratis dapat diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Di sisi lain, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang komprehensif akan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pencapaian saat ini tidak hanya dapat dipertahankan tetapi juga ditingkatkan secara berkelanjutan.

4.1.3. Sasaran Strategis 2: Partisipasi Anak Pada Layanan Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia, yang menjadi fokus strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), yang mencerminkan tingkat partisipasi anak-anak pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini, pencapaian APK pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama periode 2021-2023 memberikan gambaran mengenai efektivitas program-program pendidikan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih untuk mencapai pemerataan akses pendidikan yang lebih baik. Data capaian APK ini menjadi acuan dalam menilai progres pemerintah daerah dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.



Grafik 6. Indikator APK SD dan SMP (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024)

Berdasarkan grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Grafik 6), terdapat tren capaian yang bervariasi selama periode 2021 hingga 2023 di Kabupaten Mojokerto. Pada jenjang SD, APK menunjukkan fluktuasi dalam realisasi capaian dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2021, target APK SD ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 108%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi siswa di jenjang SD sangat tinggi, bahkan melebihi kelompok usia yang seharusnya, berkat keberhasilan program pemerintah dalam mendorong pendidikan dasar. Pada tahun 2022, target tetap pada angka 100%, dan realisasi kembali melampaui target dengan capaian sebesar 102,50%. Namun, pada tahun 2023, capaian mengalami sedikit penurunan dengan realisasi sebesar 99%, di bawah target 100%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa, seperti kemungkinan adanya putus sekolah atau kendala akses pendidikan di beberapa wilayah.

Sementara itu, pada jenjang SMP, tren APK menunjukkan capaian yang stabil dan konsisten melampaui target (Grafik 6). Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 75% berhasil dicapai dengan realisasi yang sangat tinggi, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh siswa dalam kelompok usia relevan berhasil mengakses jenjang pendidikan menengah pertama. Pada tahun 2022, target tetap dipertahankan pada 75%, namun realisasi meningkat signifikan hingga mencapai 104,97%, mencerminkan



keberhasilan program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan ke jenjang menengah pertama, termasuk melibatkan siswa dari kelompok usia di luar cakupan APK standar. Pada tahun 2023, capaian sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya tetapi tetap melampaui target dengan realisasi sebesar 101%. Hal ini menegaskan bahwa program pendidikan jenjang SMP telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi siswa.

Secara keseluruhan, capaian APK untuk jenjang SD dan SMP menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun, penurunan capaian APK SD pada tahun 2023 menjadi perhatian yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Upaya strategis seperti memperkuat infrastruktur pendidikan, meningkatkan sosialisasi program wajib belajar, dan menangani kendala partisipasi, khususnya di tingkat dasar, perlu dioptimalkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif partisipasi pendidikan. Keberhasilan capaian APK SMP yang konsisten melampaui target juga perlu diapresiasi, sekaligus dijadikan landasan untuk meningkatkan capaian pendidikan di semua jenjang secara menyeluruh.

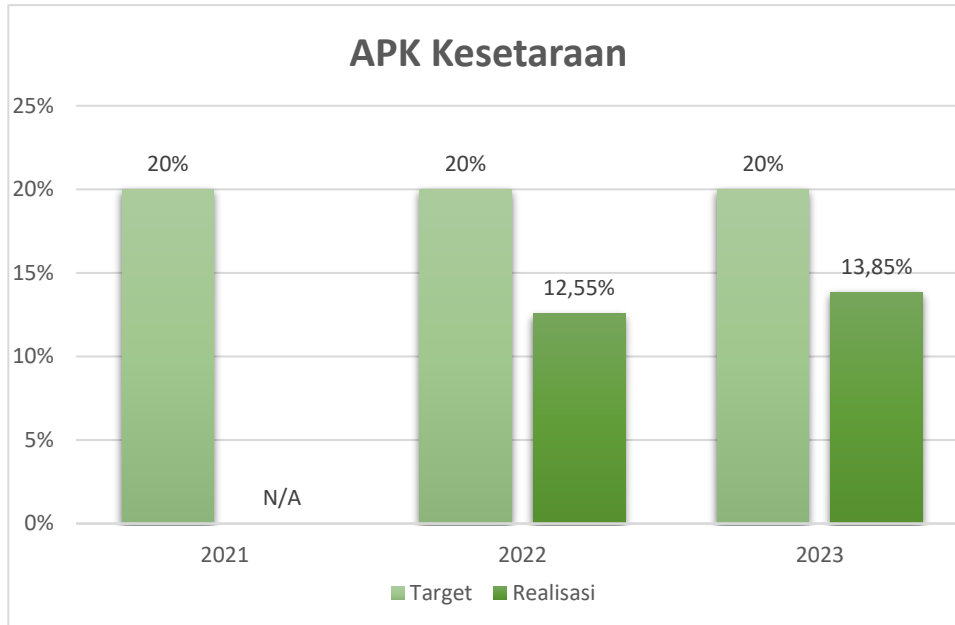
4.1.4. Sasaran Strategis 3: Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar Pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan

Sasaran strategis ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah “Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan”. Sasaran ini memiliki indikator kinerja sasaran berupa Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan. APK Kesetaraan mengacu pada persentase partisipasi masyarakat dalam program pendidikan kesetaraan, yang mencakup jenjang Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA/SMK), dibandingkan dengan total populasi dalam kelompok usia tertentu yang sesuai dengan jenjang tersebut.

Ketika target APK Kesetaraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tercapai, maka sasaran strategis ketiga ini dapat dinilai berhasil dalam implementasinya. Berdasarkan dokumen perencanaan, Pemkab Mojokerto menetapkan target APK Kesetaraan sebesar 20% untuk tahun 2021. Target yang sama juga ditetapkan untuk tahun 2022 dan 2023 (Dispendik Kab. Mojokerto, 2020). Data realisasi dan evaluasi dari target ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan yang dijalankan,



sekaligus menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan di masa mendatang.



Grafik 7. APK Kesetaraan (Dispendik Kab. Mojokerto, 2020, 2023, 2024; Pemkab Mojokerto, 2022)

Berdasarkan pantauan peneliti (Grafik 7), terdapat peningkatan dalam realisasi APK Kesetaraan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni dari 12,55% pada tahun 2022 menjadi 13,85% pada tahun 2023. Namun, pencapaian tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 20%. Pada tahun 2022, capaian APK Kesetaraan hanya mencapai 62,75% dari target dan dikategorikan rendah. Begitu pula pada tahun 2023, capaian APK Kesetaraan meningkat menjadi 69,26% dari target, tetapi tetap berada dalam kategori rendah (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

Keberhasilan pencapaian di atas 50% dalam program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mojokerto dapat diraih berkat dukungan anggaran, komitmen pimpinan, serta koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan dinas-dinas terkait. Namun demikian, kegagalan dalam mencapai target secara penuh disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tertentu terhadap pentingnya pendidikan kesetaraan. Untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengambil berbagai langkah strategis, termasuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada berbagai program dan kegiatan seperti penyelenggaraan proses belajar



nonformal/kesetaraan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan, serta pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidik dan fasilitas pendukung untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan kesetaraan (Dispendik Kab. Mojokerto, 2024).

Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan di Kabupaten Mojokerto, diperlukan serangkaian langkah konkret yang fokus pada sosialisasi, pendampingan, dan penyadaran masyarakat. Kampanye pendidikan kesetaraan melalui media lokal, seminar, dan kegiatan berbasis masyarakat harus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan kesetaraan, terutama bagi kelompok usia tertentu. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk menyampaikan pesan akan manfaat pendidikan kesetaraan dalam mendukung perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan juga menjadi prioritas. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau bahkan menghapuskan biaya program Paket A, B, dan C untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah guna mendorong partisipasi. Penambahan pusat belajar nonformal di daerah terpencil, dilengkapi fasilitas modern seperti perangkat digital dan akses internet akan memperluas jangkauan program ini. Jam belajar yang fleksibel juga perlu diterapkan agar peserta yang bekerja atau memiliki tanggung jawab lain tetap dapat mengikuti pendidikan kesetaraan.

Di sisi lain, pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kelembagaan menjadi elemen krusial. Program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pendidik nonformal harus terus dilakukan agar mereka memiliki kompetensi dalam mengajar dengan metode yang relevan dan inovatif. Kelembagaan pendidikan nonformal juga perlu diperkuat melalui bimbingan teknis dan manajemen yang efisien untuk mendukung pelaksanaan program kesetaraan secara optimal.

Terakhir, penguatan kolaborasi antarinstansi dan dengan sektor swasta serta organisasi nonpemerintah juga diperlukan. Kemitraan ini dapat mendukung pendanaan, penyediaan fasilitas, dan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Sinergi antara Dispendik, Dinsos, dan Disnaker Kab. Mojokerto harus terus ditingkatkan untuk menjangkau peserta didik potensial, khususnya di kalangan pekerja muda dan masyarakat rentan.



4.1.5. Sasaran Strategis 4: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran strategis keempat Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah "Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel". Sasaran ini memiliki lima indikator kinerja utama yaitu: pertama, nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah; kedua, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah; ketiga, persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai; keempat, persentase realisasi anggaran perangkat daerah; dan kelima, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Dinas Pendidikan (Bappeda Kab Mojokerto, 2020). Apabila kelima indikator ini tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis keempat dapat dinyatakan berhasil dalam implementasinya.

4.1.5.1. Nilai RB Perangkat Daerah



Grafik 8. Nilai RB Perangkat Daerah (Dispendik Kab. Mojokerto, 2020, 2023, 2024; Pemkab Mojokerto, 2022)

Indikator kinerja pertama pada sasaran strategis keempat adalah Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah. Nilai RB Perangkat Daerah mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan pada setiap perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan target capaian untuk indikator ini setiap tahunnya. Pada tahun 2021, target capaian minimum yang ditetapkan adalah 70,5.



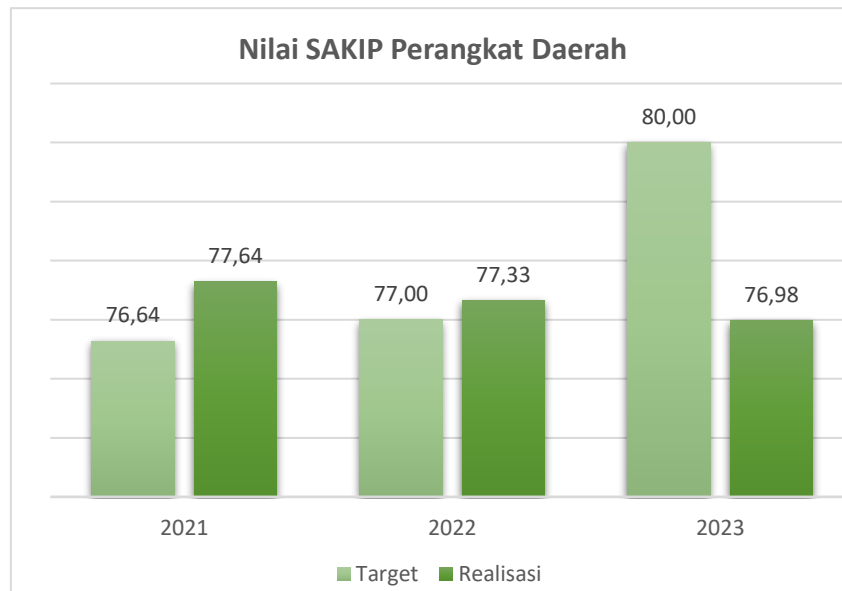
Sementara itu, untuk tahun 2022 dan 2023, target capaian meningkat menjadi 80 (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

Berdasarkan pantauan peneliti (Grafik 8), terjadi peningkatan capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi Nilai RB Perangkat Daerah mencapai 64,91, yang masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 70,5. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 92,05% dengan kategori baik. Pada tahun 2022, realisasi Nilai RB meningkat menjadi 77,97, meski belum mencapai target yang ditentukan sebesar 80. Namun, pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 97,46% dan dikategorikan sangat tinggi karena hampir mencapai target. Pada tahun 2023, realisasi Nilai RB Perangkat Daerah berhasil mencapai angka 80, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian tersebut mencapai 100% dengan kategori sangat tinggi (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024; Pemkab Mojokerto, 2022).

Untuk meningkatkan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan sasaran strategis keempat Pemerintah Kabupaten Mojokerto, penguatan sistem dan proses reformasi birokrasi menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan standard operating procedures (SOP) yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah. Evaluasi berkala atas pelaksanaan SOP diperlukan untuk memastikan proses birokrasi berjalan sesuai standar. Pendampingan teknis dari pihak terkait juga akan membantu perangkat daerah meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat menyediakan saluran pengaduan yang responsif dan mendorong keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik serta media sosial resmi. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.



4.1.5.2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Grafik 9. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dispendik Kab. Mojokerto, 2020, 2023, 2024; Pemkab Mojokerto, 2022)

Indikator kinerja sasaran kedua pada sasaran strategis keempat adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh setiap perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan target capaian untuk indikator ini setiap tahunnya. Pada tahun 2021, target capaian minimum yang ditetapkan adalah 76,64. Selanjutnya, pada tahun 2022, target capaian meningkat menjadi 77,00. Sementara itu, pada tahun 2023, target capaian yang ditetapkan lebih tinggi, yaitu sebesar 80 (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

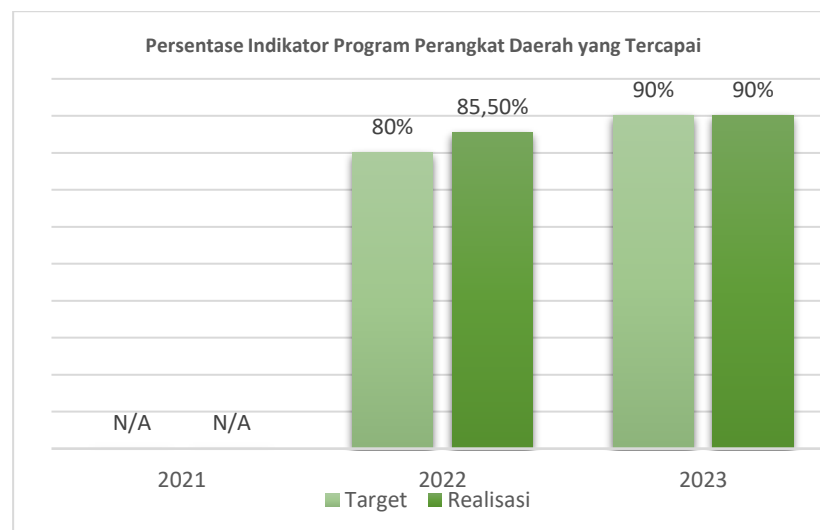
Berdasarkan pantauan peneliti (Grafik 9), meskipun terjadi penurunan realisasi, capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah masih berada di atas atau mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berhasil meraih nilai sebesar 77,64 dari target 76,64, dengan capaian sebesar 101,30% yang dikategorikan sangat tinggi. Pada tahun 2022, realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 77,33 dari target yang telah ditetapkan sebesar 77, menghasilkan capaian sebesar 100,43% yang juga dikategorikan sangat tinggi. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 76,98 dari target 80, dengan capaian sebesar 96,23%, yang tetap masuk dalam kategori sangat tinggi meskipun tidak mencapai target sepenuhnya (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).



Untuk meningkatkan capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Mojokerto, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis hasil (*outcome-based approach*) yang lebih komprehensif. Perangkat daerah harus mengintegrasikan rencana strategis mereka dengan target kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sasaran strategis tetap sejalan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Pemerintah juga dapat meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja melalui pelatihan intensif dan pendampingan teknis. Fokus pelatihan perlu mencakup penyusunan indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* (SMART)¹, pengelolaan data berbasis teknologi informasi, serta penggunaan sistem evaluasi berbasis bukti (*evidence-based assessment*). Langkah ini akan membantu perangkat daerah menghasilkan laporan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.5.3. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai



Grafik 10. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai (Dispindik Kab. Mojokerto, 2023, 2024)

Indikator kinerja sasaran ketiga pada sasaran strategis keempat adalah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai. Persentase Indikator Program

¹ Kerangka SMART digunakan untuk merumuskan tujuan yang efektif dengan lima elemen utama: *Specific*, yaitu tujuan harus secara eksplisit menyatakan perubahan yang diharapkan pada target audiens, baik dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, atau perilaku; *Measurable*, yakni tujuan harus dapat diukur untuk mengevaluasi kemajuan secara jelas; *Achievable*, artinya tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya serta program yang ada; *Relevant*, yaitu tujuan harus selaras dengan sasaran utama program dan kebutuhan peserta; serta *Time-bound*, yang menetapkan kerangka waktu spesifik untuk pencapaian tujuan. Dengan menggunakan prinsip ini, tujuan dapat dioptimalkan untuk mendukung keberhasilan program secara terukur dan terencana (Patton, 2008).



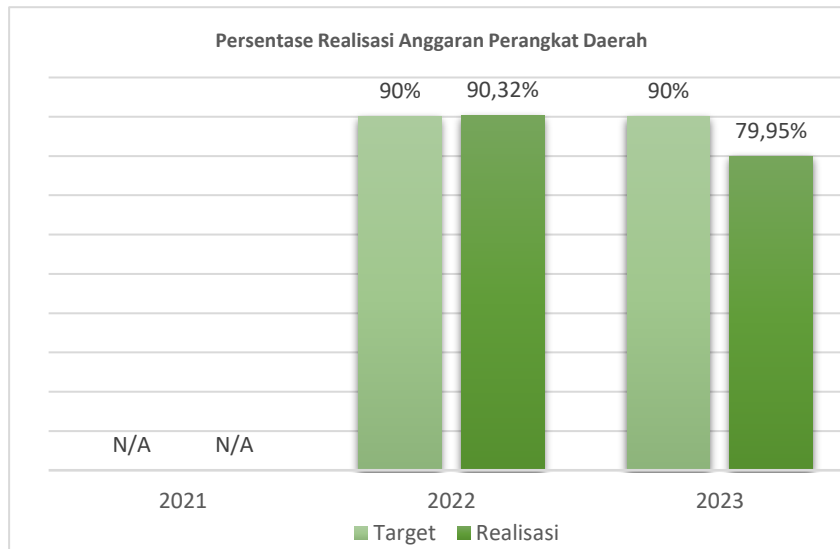
Perangkat Daerah yang Tercapai mencerminkan sejauh mana target yang ditetapkan oleh Pemkab Mojokerto tercapai dalam berbagai program perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan target capaian untuk indikator ini setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tidak ada target yang ditetapkan oleh Pemkab Mojokerto. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 80%, serta pada tahun 2023, target Program Perangkat Daerah yang Tercapai ditetapkan sebesar 90%.

Pada tahun 2022 (Grafik 9), realisasi dari Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai mencapai 85,5%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi, yakni sebesar 106,88%. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemkab Mojokerto, meskipun target yang ditetapkan sempat terlampaui. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi capaian mencapai 90%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga mencapai 100% dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi Pemkab Mojokerto dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan program perangkat daerah (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

Untuk meningkatkan Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat mengimplementasikan sejumlah langkah konkret yang terintegrasi. Pertama, penerapan sistem perencanaan terpadu menjadi prioritas utama dengan mengintegrasikan seluruh program perangkat daerah ke dalam platform digital berbasis data. Pemanfaatan aplikasi seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (*SIPD*) akan memastikan keterkaitan yang jelas antara indikator kinerja dan program yang dilaksanakan. Kedua, peningkatan kompetensi aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan teknis terkait penyusunan indikator kinerja dan manajemen program, serta lokakarya bulanan untuk berbagi praktik terbaik di lintas perangkat daerah. Ketiga, Peningkatan partisipasi publik juga perlu digalakkan melalui mekanisme survei kepuasan masyarakat dan diskusi terbuka secara berkala. Media sosial serta forum warga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan perkembangan program dan menerima masukan langsung dari masyarakat.



4.1.5.4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah



Grafik 11. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024)

Indikator kinerja sasaran keempat pada sasaran strategis keempat adalah Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan target capaian untuk indikator ini setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tidak ada target yang ditetapkan oleh Pemkab Mojokerto. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 90%, serta pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 90% (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

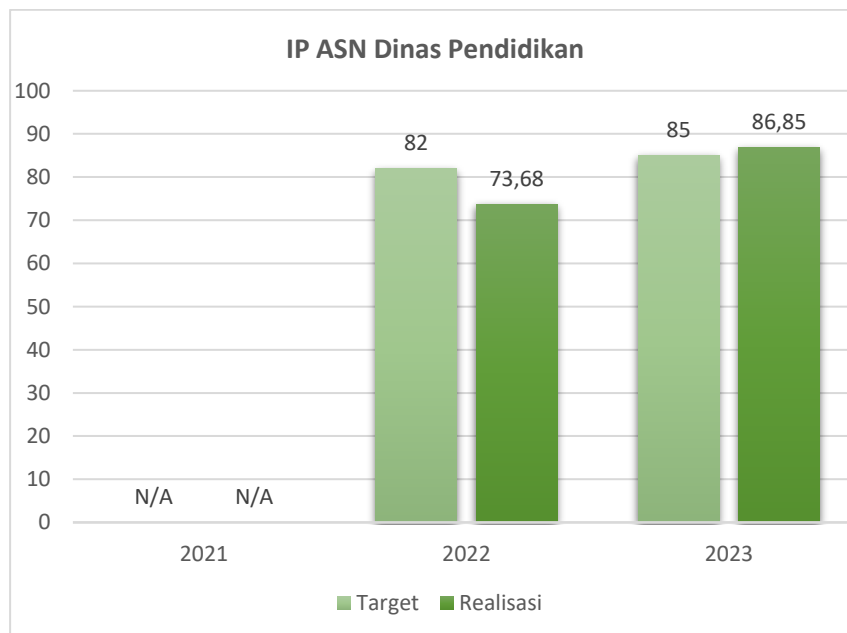
Berdasarkan pantauan peneliti (Grafik 11), Pada tahun 2022, realisasi dari Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah mencapai 90,32%, sedikit melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Capaian ini menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi, yakni sebesar 100,36%. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran oleh Pemkab Mojokerto. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi capaian hanya mencapai 79,95%, di mana masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian ini tercatat sebesar 88,83%, dengan kategori tinggi, meskipun belum memenuhi target yang ditentukan. Keberhasilan tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun pencapaian pada tahun 2023 menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan target dapat tercapai (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

Untuk meningkatkan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat mengadopsi beberapa langkah konkret guna



memastikan efektivitas pengelolaan anggaran. Pertama, Pemkab perlu memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja melalui koordinasi yang lebih intensif antara perangkat daerah, memastikan alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas program. Penggunaan sistem berbasis digital, seperti aplikasi *e-Budgeting*, akan memfasilitasi transparansi dan akurasi dalam proses perencanaan serta meminimalkan kesalahan dalam pengalokasian anggaran. Kedua, optimalisasi pelaksanaan anggaran perlu dilakukan melalui pengawasan ketat pada setiap tahap penggunaan anggaran. Tim pengendalian internal sebaiknya dilengkapi dengan *dashboard* pengelolaan anggaran yang dapat memonitor secara real-time tingkat serapan anggaran di setiap perangkat daerah. Evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan anggaran juga diperlukan untuk memastikan progres sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketiga, Pemkab Mojokerto dapat menyelenggarakan pelatihan kepada aparatur sipil negara terkait pengelolaan keuangan, terutama dalam aspek administrasi, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan anggaran. Selain itu, penerapan mekanisme insentif berbasis kinerja anggaran dapat mendorong perangkat daerah untuk lebih optimal dalam merealisasikan anggarannya.

4.1.5.5. IP ASN Dinas Pendidikan



Grafik 12. IP ASN Dinas Pendidikan (Dispdik Kab. Mojokerto, 2023, 2024)

Indikator kinerja sasaran kelima pada sasaran strategis keempat adalah IP ASN Dinas Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan target capaian



untuk indikator ini setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tidak ada target yang ditetapkan oleh Pemkab Mojokerto. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 82%, serta pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 85% (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

Berdasarkan pantauan peneliti (Grafik 12), terdapat peningkatan capaian pada IP ASN Dinas Pendidikan di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tidak ada target yang ditetapkan oleh Pemkab Mojokerto. Pada tahun 2022, realisasi IP ASN Dinas Pendidikan mencapai 73,68, yang masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 82. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 89,85% dengan kategori tinggi. Pada tahun 2023, realisasi IP ASN Dinas Pendidikan meningkat menjadi 86,85, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85. Pencapaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 102,18% dengan kategori sangat tinggi (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Pertama, Pemkab Mojokerto perlu memperluas program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi ASN Dinas Pendidikan, terutama yang berorientasi pada kebutuhan kerja saat ini, seperti penguasaan teknologi digital dan manajemen berbasis kinerja. Pelatihan ini harus dirancang sesuai dengan standar kompetensi nasional dan kebutuhan daerah, sehingga ASN mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Kedua, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan indikator yang terukur dan objektif harus terus dilakukan. Pemkab Mojokerto dapat mengintegrasikan sistem *performance appraisal*² berbasis teknologi untuk memantau produktivitas dan efektivitas kerja ASN secara transparan. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja mereka.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis keempat didorong oleh dukungan anggaran yang memadai, komitmen pimpinan, serta koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan

² *Performance appraisal* adalah sistem formal yang mengevaluasi kualitas kinerja karyawan. Di banyak organisasi, sistem penilaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi karyawan dengan kinerja terbaik yang berhak menerima kenaikan gaji berbasis prestasi, bonus, dan promosi. Sistem penilaian kinerja memiliki peran penting dalam kinerja organisasi, karena dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut (E.Deepa & Dr.S.Kuppusamy, 2011).



Kabupaten Mojokerto dengan dinas-dinas terkait. Namun, terdapat kendala dalam pencapaian hasil yang optimal, salah satunya adalah penambahan komponen penilaian yang berdampak pada penurunan nilai yang diperoleh. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai langkah telah dilakukan, termasuk memaksimalkan program yang telah direncanakan, seperti Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, serta Pengadaan Barang Milik Daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang (Dispendik Kab. Mojokerto, 2024).

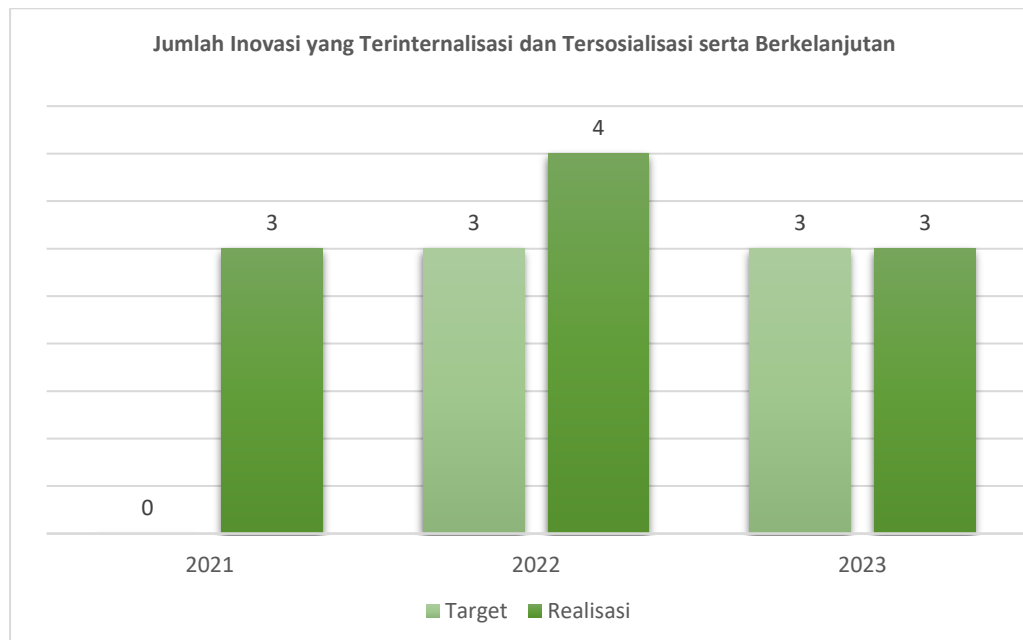
Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis keempat secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dispendik dapat mempertimbangkan beberapa langkah tambahan. Pertama, melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dilakukan, termasuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian target. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi komponen yang memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. Kedua, memperkuat kapasitas ASN dalam memahami dan mengelola komponen penilaian baru -sebagaimana adanya perubahan nilai target dari yang telah direncanakan sebelumnya- melalui pelatihan intensif terkait standar penilaian, pengumpulan data, dan penyusunan laporan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ketiga, mengembangkan sistem pemantauan kinerja berbasis digital untuk memfasilitasi pelaporan dan analisis capaian secara *real-time*, sehingga kendala dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Selain itu, Pemkab Mojokerto melalui Dispendik dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti akademisi, konsultan, atau lembaga pelatihan untuk memberikan masukan strategis dan memastikan program-program berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Terakhir, memperkuat komunikasi publik mengenai capaian, tantangan, dan rencana perbaikan melalui sosialisasi yang efektif akan meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada, meningkatkan efisiensi program, dan memastikan tercapainya sasaran strategis secara optimal.

4.1.6. Sasaran Strategis 5: Pembangunan Inovasi Daerah

Sasaran strategis kelima yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah “Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai



Nilai Tambah”. Sasaran ini memiliki indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan.



Grafik 13. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan (Dispindik Kab. Mojokerto, 2023, 2024)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan target capaian untuk Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tidak ada target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, Pemkab Mojokerto menetapkan target sebanyak 3 inovasi untuk terinternalisasi, tersosialisasi, dan berkelanjutan. Sementara itu, pada tahun 2023, target yang ditetapkan tetap sebesar 3 inovasi. Target-target ini menjadi acuan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan inovasi daerah yang berkelanjutan (Dispindik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

Berdasarkan pantauan peneliti (Grafik 13), terdapat perkembangan capaian Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Pemkab Mojokerto berhasil mencapai 3 inovasi, meskipun tidak ada target yang ditetapkan pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, realisasi jumlah inovasi meningkat menjadi 4 inovasi, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3 inovasi, dengan capaian 133,33% yang dikategorikan sangat tinggi. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi inovasi mencapai 3 inovasi, sesuai dengan target yang ditetapkan,



sehingga capaian tercatat sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).

Keberhasilan pencapaian jumlah inovasi yang terinternalisasi, tersosialisasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto dapat diraih berkat dukungan anggaran yang memadai, komitmen pimpinan, serta koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan dinas-dinas terkait. Pada tahun 2022, realisasi jumlah inovasi mencapai 4 inovasi, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3 inovasi dengan capaian 133,33%, yang menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Meskipun tidak ada kegagalan yang signifikan, pencapaian pada tahun 2023 mencapai 3 inovasi, sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan capaian 100%. Untuk mempertahankan keberhasilan ini, langkah-langkah strategis telah diambil, seperti mendorong seluruh perangkat Dinas Pendidikan untuk lebih peka terhadap permasalahan sekitar dan mengambil inisiatif untuk melakukan inovasi atas permasalahan tersebut. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas inovasi yang dihasilkan dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan capaian jumlah inovasi yang terinternalisasi, tersosialisasi, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dispendik dapat mengimplementasikan beberapa rekomendasi. Pertama, Pemkab Mojokerto melalui Dispendik dapat mengembangkan *Innovation Task Force* untuk mengidentifikasi kebutuhan inovasi secara spesifik dan memastikan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Task force ini dapat bertanggung jawab dalam memantau kemajuan setiap inovasi, memberikan umpan balik, serta memastikan keberlanjutan inovasi yang telah ada. Kedua, menyediakan pelatihan rutin bagi aparatur sipil negara (ASN) mengenai pengembangan inovasi berbasis teknologi, pendekatan partisipatif, serta manajemen keberlanjutan agar inovasi yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak jangka panjang. Ketiga, membentuk kemitraan strategis dengan perguruan tinggi atau lembaga *think tank*, untuk mendukung penelitian, pengembangan, serta implementasi inovasi. Kolaborasi ini dapat menghasilkan ide-ide inovatif yang lebih komprehensif dan aplikatif. Keempat, menerapkan mekanisme penghargaan dan insentif bagi individu yang berhasil menciptakan inovasi dengan dampak signifikan, guna mendorong budaya inovasi di kalangan ASN. Terakhir, melakukan evaluasi tahunan terhadap inovasi yang telah terinternalisasi, mencakup dampaknya terhadap pelayanan publik dan keberlanjutan inovasi tersebut.



Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas inovasi di masa depan, sekaligus memastikan pencapaian sasaran strategis yang lebih baik.

4.2. Capaian Program Prioritas Bupati

Kabupaten Mojokerto telah menetapkan tiga pilar utama dalam pembangunan prioritas daerah yaitu Mojokerto Maju, Mojokerto Adil, dan Mojokerto Makmur yang salah satunya bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Melalui pilar Mojokerto Maju, Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus pada peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan pendidik untuk menciptakan SDM yang kompeten dan siap bersaing. Sementara itu, Mojokerto Adil berfokus pada pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk melalui program biaya sekolah gratis dan insentif bagi guru. Pada pilar Mojokerto Makmur, pemberdayaan siswa berprestasi dengan pemberian beasiswa menjadi prioritas untuk memastikan generasi yang produktif dan berkualitas. Ketiga pilar ini mendukung visi besar Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.2.1. Mojokerto Maju

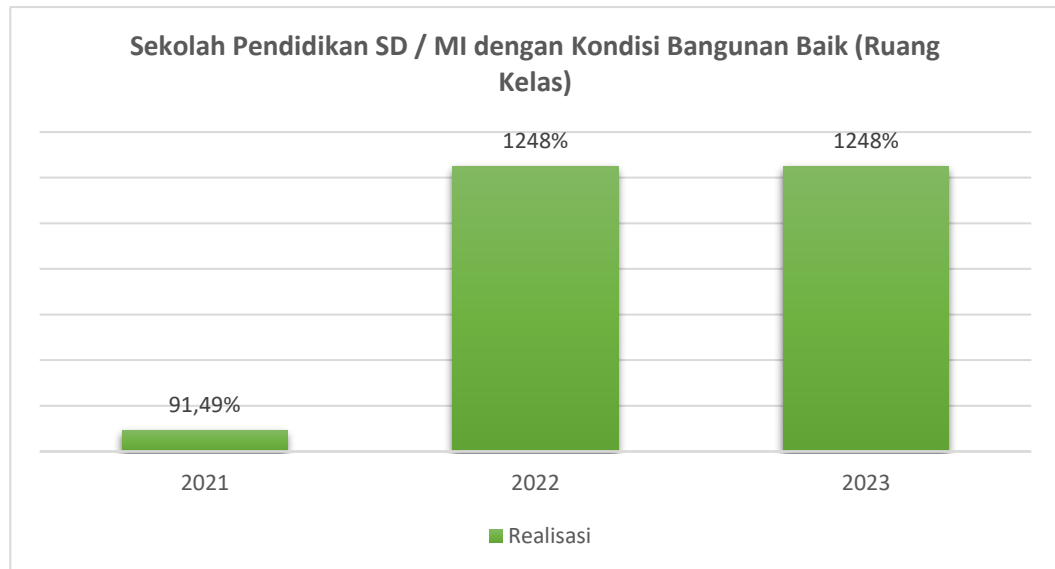
Dalam pilar Mojokerto Maju, perhatian difokuskan pada transformasi pendidikan sebagai fondasi peradaban yang lebih tinggi. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan membangun serta merehabilitasi gedung sekolah, memperbaiki fasilitas pembelajaran, dan menyediakan teknologi pendukung. Selain itu, kualitas pendidik juga terus ditingkatkan melalui program pelatihan dan sertifikasi untuk menciptakan tenaga pengajar yang kompeten.

4.2.1.1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Serta Kualitas Pendidik

Dalam rangka mewujudkan visi besar Kabupaten Mojokerto untuk menjadi daerah yang maju dan cerdas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Hal ini tidak hanya penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa, tetapi juga menjadi pondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis telah diambil untuk memastikan alokasi anggaran yang efektif dan realisasi yang



optimal dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, sebagaimana tercermin dalam pencapaian pengelolaan kondisi bangunan sekolah pada periode 2021-2023.



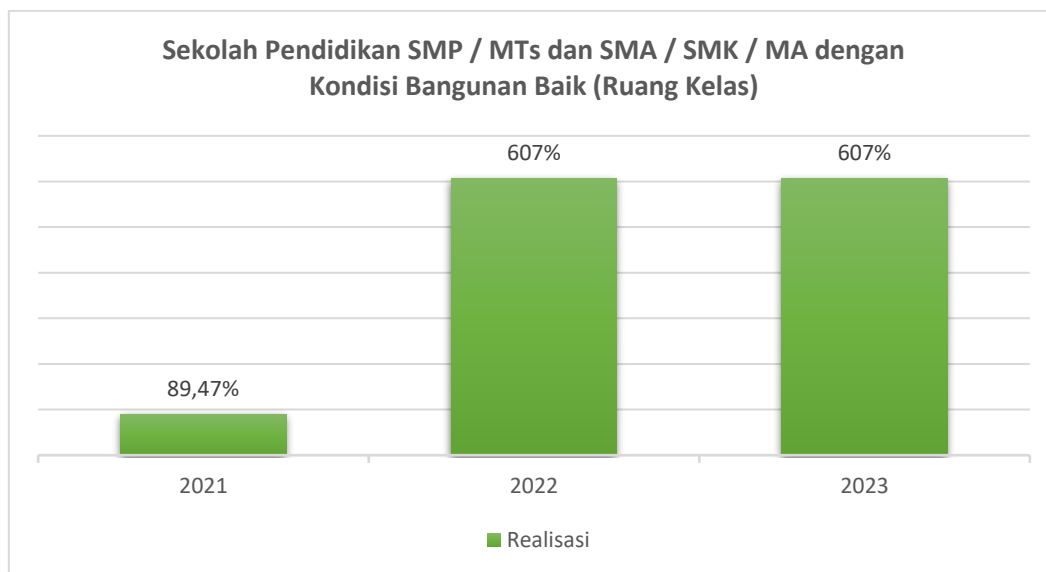
Grafik 14. Sekolah Pendidikan SD / MI dengan Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas) (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023)

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendidikan berhasil merealisasikan pengelolaan kondisi bangunan SD/MI yang layak dengan persentase pencapaian sebesar 91,49%. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan dasar. Selanjutnya, pada tahun 2022, realisasi pengelolaan kondisi bangunan SD/MI meningkat signifikan hingga mencapai 1248%, yang menunjukkan lonjakan luar biasa dari anggaran dan komitmen untuk perbaikan fasilitas pendidikan. Kondisi ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi pengelolaan kondisi bangunan SD/MI tetap berada pada angka pencapaian 1248%, mencerminkan stabilitas dalam alokasi dan implementasi anggaran pendidikan yang telah ditingkatkan secara drastis sejak tahun sebelumnya (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024). Peningkatan ini mengindikasikan adanya perhatian besar terhadap kebutuhan infrastruktur pendidikan yang baik dan memadai sebagai bagian dari upaya mencerdaskan masyarakat Mojokerto.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2021-2023 (Grafik 14), peningkatan realisasi hingga 12,48 kali lipat dari anggaran awal menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, terutama



di tingkat sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI). Langkah ini tidak hanya mencerminkan penggunaan anggaran yang strategis, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pada peningkatan kualitas sarana pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya ini sejalan dengan visi Mojokerto untuk menjadi lebih maju dan cerdas, dengan fokus pada pembangunan manusia melalui pendidikan yang berkualitas.



Grafik 15. Sekolah Pendidikan SMP / MTs dan SMA / SMK / MA dengan Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas) (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023)

Berdasarkan data yang disajikan, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendidikan mencatat realisasi pengelolaan kondisi bangunan SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA yang layak mencapai persentase 89,47%. Persentase ini mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan untuk jenjang menengah. Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2023, terjadi lonjakan signifikan dalam realisasi pengelolaan kondisi bangunan jenjang pendidikan ini, dengan pencapaian yang konsisten sebesar 607%. Angka ini menunjukkan bahwa alokasi dana dan realisasi anggaran untuk sektor pendidikan mengalami peningkatan lebih dari enam kali lipat dibandingkan dengan anggaran awal yang direncanakan (Grafik 15).

Peningkatan ini menggambarkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah ini tidak hanya bertujuan untuk



menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, tetapi juga mendukung pengembangan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dengan peningkatan signifikan dalam alokasi dan realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan akses pendidikan berkualitas bagi semua siswa di jenjang pendidikan menengah. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi besar untuk memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, Pemkab Mojokerto melalui Dispendik perlu memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak. Selain itu, evaluasi rutin terhadap penggunaan dana dan realisasi pembangunan dapat membantu mengoptimalkan hasil dan mengurangi pemborosan anggaran. Dengan pendekatan ini, alokasi anggaran dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan prioritas di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Disoendik juga perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan di daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pembangunan infrastruktur. Sekolah-sekolah di daerah ini sering kali menghadapi tantangan besar dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, penambahan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, sanitasi yang baik, dan fasilitas olahraga yang cukup akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa di wilayah tersebut.

Peningkatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pendidikan yang sudah ada juga sangat penting. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa fasilitas yang telah diperbaiki tetap dalam kondisi baik dan mendukung proses pembelajaran. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengimplementasikan sistem pemantauan berkala dan perawatan preventif agar kerusakan fasilitas dapat segera diatasi sebelum mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dengan langkah ini, kualitas sarana pendidikan yang sudah dibangun dapat dipertahankan dalam jangka panjang.



4.2.1.1.1. Bukti Konkret Pencapaian Bupati Ikfina dalam Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Selama periode 2021-2023 berlangsung, Pemkab Mojokerto memiliki visi sebagai kabupaten yang cerdas dan maju, keberhasilan dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu pencapaian signifikan di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina. Langkah nyata ini tercermin dalam berbagai proyek rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan yang tersebar di seluruh jenjang, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah. Komitmen yang kuat terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan tidak hanya mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pendidikan adalah prioritas utama dalam pembangunan daerah. Berikut adalah sejumlah bukti konkret yang menggambarkan keberhasilan ini, yang menjadi tonggak penting dalam upaya mencerdaskan generasi masa depan Kabupaten Mojokerto. Adapun beberapa hasil realisasi dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1) Dispendik Kabupaten Mojokerto Miliki Belasan Proyek Rehab Sekolah Ramping

Dispendik Kabupaten Mojokerto, Sambut Tahun Ajaran Baru, Belasan Proyek Rehab Sekolah Ramping

Indah Oceananda - Kamis, 2 November 2023 | 04:15 WIB



Gambar 4. Headline Berita Proyek Rehab Sekolah Ramping Mojokerto (Oceananda, 2023b)

Menjelang akhir tahun 2023 (Gambar 4), Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berhasil menyelesaikan rehabilitasi 17 bangunan sekolah yang mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Proyek perbaikan ini meliputi 3 TK Negeri, 11 SD (termasuk SD Negeri Sukosari, SD Negeri Rejosari, dan lainnya), serta 3 SMP (SMP Negeri 1 dan 2 Trawas, SMP Negeri 3 Kutorejo). Rehabilitasi ini dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto, memberikan



dampak nyata bagi kenyamanan dan keselamatan siswa dalam proses pembelajaran (Oceananda, 2023b).

2) Pengerjaan Rehab Gedung Sekolah Mojokerto Capai 50 Persen, Ada 2 Sekolah Sudah Tuntas



Gambar 5. Headline Berita Proyek Rehab Sekolah Rampung Mojokerto (Romadoni, 2024b)

Pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 menunjukkan progres yang signifikan dengan rata-rata pencapaian 40-50 persen untuk sebagian besar sekolah (Gambar 5). Dua sekolah, yaitu SDN Jerukseger dan SDN Ngembah, bahkan telah menyelesaikan rehabilitasi secara keseluruhan atau mencapai progres 100 persen. Proyek rehabilitasi ini mencakup total 44 lembaga pendidikan, dengan alokasi anggaran senilai Rp 20,7 miliar. Dalam pendistribusian anggaran, SDN Ngembah tercatat menerima alokasi terbesar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 1,8 miliar. Hal ini menunjukkan fokus Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memastikan infrastruktur pendidikan berada dalam kondisi terbaik untuk mendukung proses belajar mengajar (Romadoni, 2024b).

3) Perbaikan Infrastruktur Sekolah di 2024 Disokong APBD Pemkab Mojokerto Senilai Rp 20,7 Miliar



Gambar 6. Headline Berita Perbaikan Infrastruktur Sekolah (Romadoni, 2024a)



Pada tahun 2024 (Gambar 6), Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan melalui alokasi anggaran sebesar Rp 20,7 miliar dari APBD. Dana ini digunakan untuk mendukung 61 proyek rehabilitasi yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, meliputi 17 SMP, 29 SD, dan 15 TK. Komitmen ini menunjukkan keberlanjutan perhatian pemerintah terhadap pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memastikan tercapainya target perbaikan dan rehabilitasi sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan aman bagi peserta didik (Romadoni, 2024a).

4) Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan, 12 Lembaga Pendidikan Mojokerto Bakal Direnovasi

Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan, 12 Lembaga Pendidikan Mojokerto Bakal Direnovasi

Editor: Nur Syaifudin | Wartawan: Rochmat Saiful Aris | Sabtu, 13 Juli 2024 16:30 WIB



Gambar 7. Headline Berita Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan, 12 Lembaga Pendidikan Mojokerto Bakal Direnovasi (Syaifudin, 2024)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melalui Dinas Pendidikan (Gambar 7), akan merehabilitasi sarana pendidikan di 12 lembaga dengan anggaran DAK 2024. Proyek ini mencakup ruang kelas, ruang UKS, laboratorium, dan perpustakaan, dengan total pagu Rp8,8 miliar: TK satu lembaga (Rp418 juta), SD lima lembaga (Rp4,4 miliar), dan SMP enam lembaga (Rp4 miliar). Proses kontrak telah selesai, dan konstruksi segera dimulai untuk mendukung pembelajaran yang aman dan nyaman (Syaifudin, 2024).



5) Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Sediakan Anggaran Puluhan Miliar untuk Rehabilitasi Sekolah

Sosial

Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Sediakan Anggaran Puluhan Miliar untuk Rehabilitasi Sekolah



@Redaksi
Senin, 15 Agustus 2022, 13:58 WIB



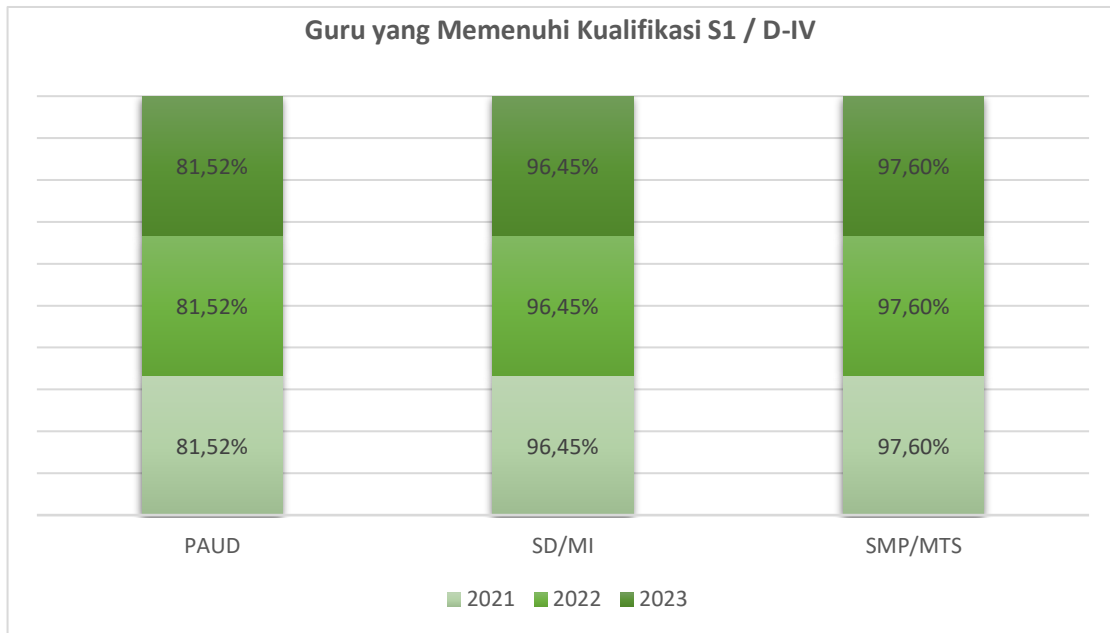
Komentar ()

Gambar 8. Headline Berita Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan, 12 Lembaga Pendidikan Mojokerto Bakal Direnovasi (BNRI News, 2022)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran puluhan miliar pada 2022 untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru di TK, SD, dan SMP (Gambar 8). Proyek ini terbagi dalam tiga tahap: tahap 1 mencakup 8 paket lelang senilai Rp4,8 miliar, tahap 2 dengan anggaran Rp30 miliar melalui swakelola DAK 2022 untuk 39 lembaga pendidikan, dan tahap 3 dengan 24 paket penunjukan langsung senilai Rp2,5 miliar. Semua proyek ini diawasi publik untuk memastikan transparansi dan mencegah penyimpangan (BNRI News, 2022).

4.2.1.2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dari Kualitas Pendidik

Komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari upaya peningkatan kualitas pendidik. Kualifikasi guru sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai mutu pendidikan di daerah. Berikut adalah perkembangan kualifikasi guru pada berbagai jenjang Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.



Grafik 16. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024)

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau D-IV tercatat stabil pada kisaran 81,5% hingga 81,52% selama periode yang diamati. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan dalam mempertahankan standar kualitas pendidik di tingkat pendidikan usia dini, yang menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Sementara itu, pada jenjang SD/MI, terjadi peningkatan signifikan dalam persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV. Pada awal periode, persentase ini berada di angka 95% dan meningkat menjadi 96,45%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik pada jenjang pendidikan dasar (Grafik 15).

Di jenjang SMP/MTs, persentase guru yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D-IV juga mengalami peningkatan. Pada awalnya, angka ini mencapai 96,7% dan terus meningkat hingga mencapai 97,6% di tahun terakhir periode yang dicatat (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024). Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam memastikan seluruh guru pada tingkat menengah pertama memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kompetensi pendidik melalui pemenuhan kualifikasi akademik.



Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendukung pengembangan mutu pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, Pemkab Mojokerto harus fokus pada peningkatan kualitas pendidik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah merancang program pelatihan berkelanjutan bagi para guru di seluruh jenjang pendidikan, khususnya dalam penerapan metode pengajaran yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Program pelatihan ini dapat memastikan para pendidik memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Selain itu, pemberian insentif bagi guru yang berprestasi atau yang bekerja di daerah terpencil dapat menjadi motivasi yang efektif dalam meningkatkan kinerja.

4.2.1.2.1. Bukti Konkret Pencapaian Bupati Ikfina dalam Peningkatan Kualitas Pendidik di Kab Mojokerto

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan mengenai program pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah, penelusuran terhadap bukti konkret pencapaian yang telah diraih menjadi langkah penting untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, peran dan komitmen dalam menjalankan program prioritas bupati telah menghasilkan sejumlah capaian yang dapat diukur melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemaparan berikut ini akan menitikberatkan pada bukti-bukti nyata yang muncul dari kebijakan dan program pelatihan, pengembangan kapasitas, serta sistem penilaian kinerja guru. Adapun beberapa hasil realisasi dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1) Orientasi 210 Tenaga Pendidik PPPK Kabupaten Mojokerto



Gambar 9. Orientasi 210 Tenaga Pendidik PPPK Kabupaten Mojokerto (Inilah Mojokerto, 2024)



Pada September 2024 (Gambar 9), Bupati Ikfina memimpin orientasi bagi 210 tenaga pendidik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam menjalankan tugas sebagai ASN (Inilah Mojokerto, 2024).

2) Hadiri Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, Bupati Ikfina Apresiasi Guru Di Bumi Majapahit



Gambar 10. Bupati Ikfina Hadiri Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 (Diskominfo Mojokerto, 2024)

Bupati Ikfina mendorong seluruh guru di Kabupaten Mojokerto untuk menjadi Guru Penggerak (Gambar 10). Beliau menghadiri Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 pada April 2024 dan memberikan apresiasi kepada para guru yang berpartisipasi dalam program tersebut. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran (Diskominfo Mojokerto, 2024)

4.2.2. Mojokerto Adil

Melalui pilar Mojokerto Adil, pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas utama, memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara, terlepas dari latar belakang sosial atau geografis. Program biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah menjadi langkah nyata untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, insentif bagi guru TPQ dan swasta, penyediaan kuota internet gratis selama pandemi Covid-19, serta pembangunan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama, mencerminkan upaya untuk mendukung pendidikan agama dan moral masyarakat.



4.2.2.1. Pemberian Insentif Guru TPQ dan Guru Swasta



Grafik 17. Pemberian Insentif Guru TPQ (Hermansyah, 2022; Surabaya Pagi, 2023)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik agama, khususnya guru TPQ, melalui pemberian insentif yang meningkat setiap tahunnya (Grafik 17). Pada tahun 2022, insentif yang diberikan kepada guru TPQ sebesar Rp200.000 per guru sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam pendidikan keagamaan (Hermansyah, 2022). Komitmen ini meningkat signifikan pada tahun 2023 dengan besaran insentif naik menjadi Rp400.000 per guru (Surabaya Pagi, 2023).

Kenaikan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya strategis Pemkab Mojokerto untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agama secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mendukung pendidikan karakter dan nilai keagamaan di masyarakat. Tren ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan keagamaan melalui apresiasi yang konkret terhadap guru TPQ.

Untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi program peningkatan kesejahteraan guru TPQ, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dispendik dapat mengimplementasikan beberapa langkah strategis. Pertama, Pemkab Mojokerto melalui Dispendik dapat menetapkan roadmap jangka panjang untuk pemberian insentif,

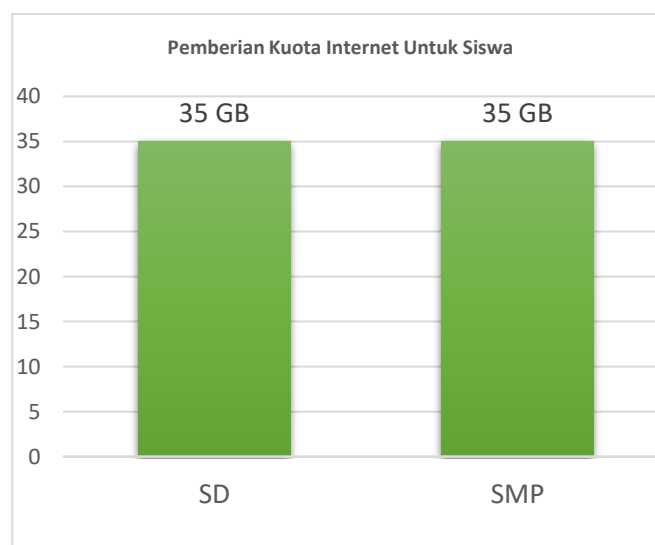


sehingga peningkatan insentif dapat direncanakan secara terukur dan konsisten sesuai dengan kapasitas anggaran daerah. Roadmap ini juga dapat mencakup penyesuaian insentif berdasarkan inflasi dan kebutuhan guru TPQ.

Kedua, pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi guru TPQ, seperti pelatihan metode pengajaran modern dan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran agama. Dengan demikian, insentif yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di tingkat TPQ.

Ketiga, membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan distribusi insentif berjalan tepat sasaran dan transparan. Keempat, memperluas dukungan non-finansial, seperti akses kepada fasilitas pendidikan, buku-buku ajar, dan alat peraga. Dukungan ini akan melengkapi insentif yang diberikan, sehingga guru TPQ memiliki sarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terakhir, pemerintah dapat melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta dalam mendukung program kesejahteraan guru TPQ. Melalui kolaborasi ini, berbagai pihak dapat berkontribusi dalam memperkuat peran guru TPQ dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

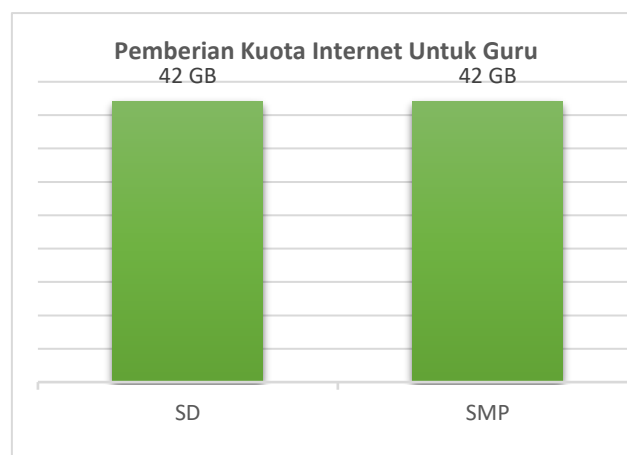
4.2.2.2. Pemberian Kuota Internet Gratis Bagi Siswa dan Guru Selama Pandemi Covid-19



Grafik 18. Pemberian Kuota Internet Untuk Siswa (Suara Mojokerto, 2020)



Untuk mengatasi kendala pembelajaran daring selama pandemi Covid-19, Pemkab Mojokerto mengambil langkah strategis untuk mendukung akses pendidikan melalui pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru (Grafik 18). Pada tahun 2020, dalam menghadapi tantangan besar yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap sektor pendidikan, Pemkab Mojokerto mengambil langkah strategis dengan memberikan bantuan kuota internet sebesar 35 GB kepada siswa SD dan SMP di seluruh sekolah di wilayah Mojokerto (Suara Mojokerto, 2020). Bantuan ini bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang menjadi solusi utama selama masa pembatasan sosial. Dengan adanya kuota internet tersebut, siswa dapat mengakses materi pembelajaran, mengikuti kelas daring, dan tetap terhubung dengan guru secara virtual. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi beban finansial orang tua siswa, tetapi juga memastikan keberlangsungan pendidikan meski dalam situasi krisis.



Grafik 19. Pemberian Kuota Internet Guru untuk Tidak Mampu (Suara Mojokerto, 2020)

Selain itu, Pemkab Mojokerto memberikan dukungan signifikan kepada para guru SD dan SMP dengan menyediakan bantuan kuota internet sebesar 42 (Suara Mojokerto, 2020). Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran proses pengajaran daring, yang menjadi tantangan utama di tengah pembatasan sosial. Dengan kuota internet tersebut, para guru dapat mengakses platform pembelajaran digital, menyusun materi ajar, serta menyelenggarakan kelas daring secara efektif (Grafik 19).

Bantuan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung para pendidik yang menjadi ujung tombak pendidikan di masa krisis. Selain itu, penyediaan kuota yang cukup besar membantu guru mengatasi kendala teknis seperti



keterbatasan akses internet, yang berpotensi mengganggu kualitas pembelajaran. Dengan langkah ini, Pemkab Mojokerto tidak hanya memastikan keberlanjutan pendidikan tetapi juga mendorong adaptasi cepat terhadap teknologi dalam dunia pendidikan.

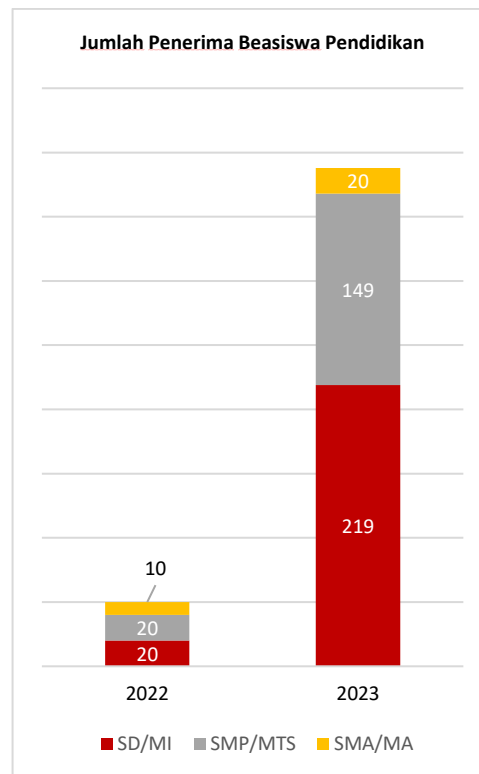
Untuk meningkatkan efektivitas langkah strategis pemberian kuota internet dalam mendukung pembelajaran daring, Pemkab Mojokerto melalui Dispendik dapat mengadopsi beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah dapat berkolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk menghadirkan paket khusus pembelajaran daring dengan kuota yang berfokus pada akses platform pendidikan, seperti Google Classroom atau Zoom, guna memaksimalkan penggunaan kuota untuk kebutuhan akademik.

Kedua, pemerintah dapat melengkapi program kuota internet dengan penyediaan perangkat keras, seperti tablet atau laptop, bagi siswa dan guru yang tidak memiliki perangkat yang memadai. Hal ini dapat dilakukan melalui skema pinjaman perangkat atau subsidi pembelian dengan dana hibah atau kerja sama dengan pihak swasta. Ketiga, untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran daring, pelatihan intensif bagi guru tentang penggunaan teknologi dan platform digital perlu diselenggarakan secara berkala. Hal ini akan membantu para pendidik memanfaatkan kuota internet secara lebih produktif dan meningkatkan kualitas pengajaran daring.

Terakhir, Pemkab Mojokerto melalui Dispendik perlu mengevaluasi secara rutin dampak program pemberian kuota internet, baik dari segi aksesibilitas maupun efektivitas dalam mendukung pembelajaran. Mekanisme survei dan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua dapat memberikan gambaran yang lebih baik untuk meningkatkan desain dan pelaksanaan program di masa mendatang.



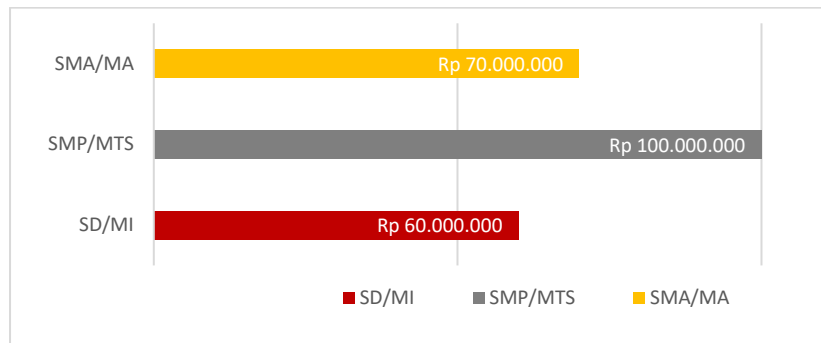
4.2.2.3. Biaya Sekolah Gratis Bagi Pelajar Tingkat Dasar dan Menengah



Grafik 20. Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan 2022-2023 (Inilah Mojokerto, 2022; Oceananda, 2023a; Prihatini, 2023)

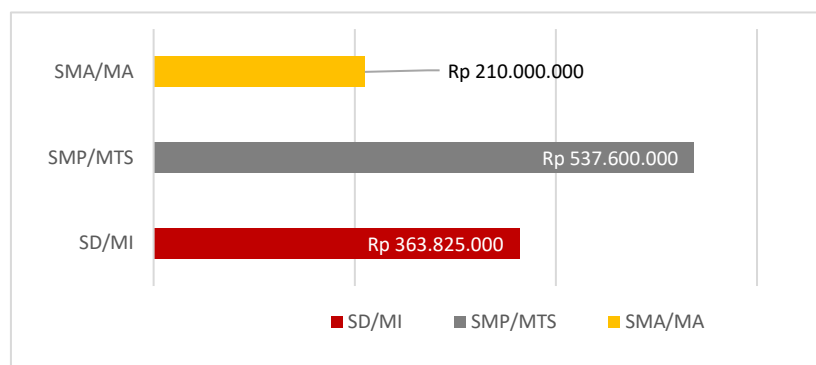
Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses pendidikan melalui program pembebasan biaya sekolah bagi pelajar tingkat dasar dan menengah. Langkah strategis ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan finansial. Program ini menjadi salah satu upaya konkret dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan pengamatan peneliti (Grafik 20), jumlah penerima beasiswa pendidikan di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan signifikan selama periode 2022 hingga 2023. Pada tahun 2022, penerima beasiswa terdiri dari 20 siswa SD/MI, 20 siswa SMP/MTs, dan 10 siswa SMA/MA (Inilah Mojokerto, 2022). Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2023, dengan penerima beasiswa SD/MI naik lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 219 siswa, SMP/MTs bertambah menjadi 149 siswa, dan SMA/MA tetap stabil di angka 20 siswa (Oceananda, 2023a; Prihatini, 2023). Perkembangan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan mendukung siswa di semua jenjang melalui program beasiswa yang semakin inklusif.



Grafik 21. Total Anggaran Beasiswa Pendidikan Tahun 2022

Pada tahun 2022 (Grafik 21), Pemkab Mojokerto mengalokasikan anggaran sebesar Rp230.000.000 untuk program beasiswa pendidikan bagi siswa di jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, dengan total penerima sebanyak 50 siswa. Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk siswa SMP/MTs dengan nilai Rp100.000.000, mencerminkan perhatian khusus terhadap pendidikan di jenjang ini. Selanjutnya, beasiswa untuk siswa SMA/MA mencapai Rp70.000.000, sedangkan siswa SD/MI menerima alokasi sebesar Rp60.000.000 (Inilah Mojokerto, 2022).



Grafik 22. Total Anggaran Beasiswa Pendidikan Tahun 2023

Pada tahun 2023 (Grafik 21), Pemkab Mojokerto mengalokasikan total anggaran sebesar Rp1.111.425.000 untuk program beasiswa pendidikan, yang disalurkan kepada 388 siswa di jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Penerima terbanyak dan alokasi anggaran terbesar diberikan pada jenjang SMP/MTs, dengan total dana Rp537.600.000, mencerminkan prioritas pemerintah untuk memperkuat pendidikan di tingkat menengah pertama. Jenjang SD/MI menerima anggaran sebesar Rp363.825.000, sedangkan jenjang SMA/MA mendapatkan alokasi sebesar Rp210.000.000 (Oceananda, 2023a; Prihatini, 2023).

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berhasil menunjukkan komitmen yang konsisten dan signifikan dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan melalui



berbagai program strategis, termasuk pembebasan biaya sekolah dan beasiswa pendidikan. Peningkatan jumlah penerima beasiswa dan alokasi anggaran yang terus bertambah setiap tahun, khususnya pada periode 2022 hingga 2023, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan manfaat program pendidikan. Penekanan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dengan prioritas pada SD/MI dan SMP/MTs, menunjukkan fokus Pemkab Mojokerto dalam membangun fondasi pendidikan yang kokoh dan inklusif. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, mencegah putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

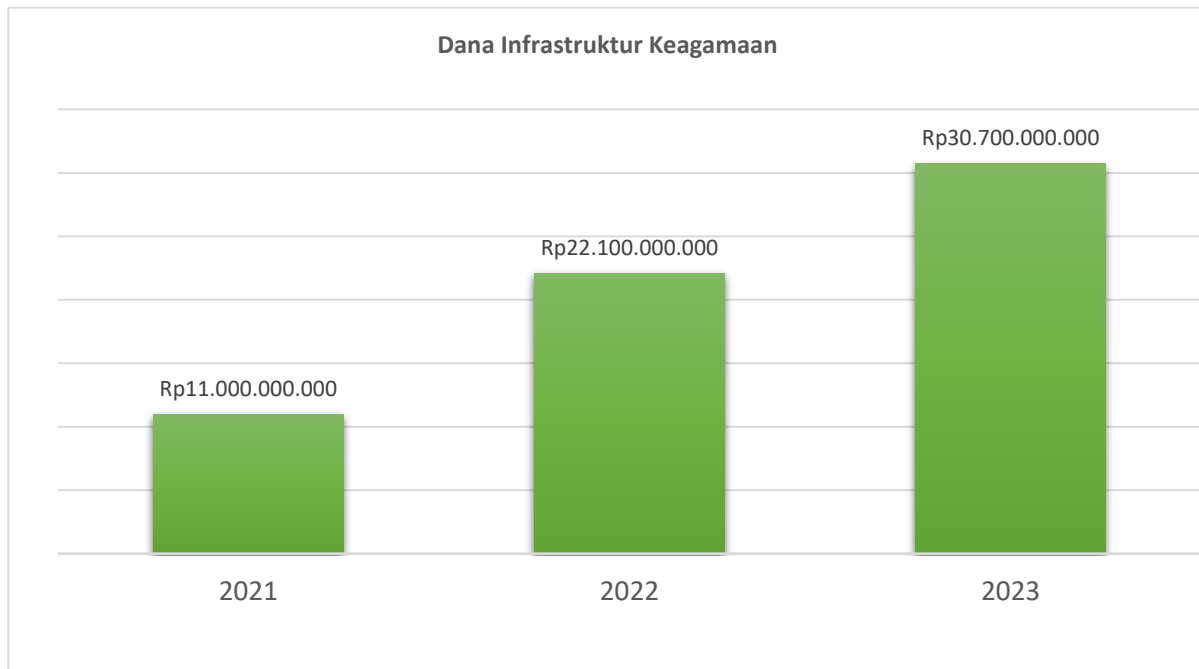
Untuk mendukung keberlanjutan program pembebasan biaya sekolah dan beasiswa pendidikan, Dispendik Kabupaten Mojokerto dapat memperkuat sistem pendataan dengan membangun platform digital terpadu. Sistem ini harus mencakup informasi lengkap terkait latar belakang ekonomi, prestasi akademik, dan kebutuhan pendidikan siswa. Dengan demikian, pemberian beasiswa dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, Dispendik dapat memperluas sumber pendanaan dengan menjalin kolaborasi bersama pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Langkah ini berpotensi menambah kapasitas anggaran, sehingga program beasiswa dan pembebasan biaya sekolah dapat menjangkau lebih banyak siswa, khususnya di wilayah yang masih memiliki tingkat partisipasi pendidikan rendah.

Tidak hanya memberikan bantuan finansial, Dispendik juga dapat memperkenalkan program pendampingan bagi siswa penerima beasiswa. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, bimbingan belajar, atau mentoring untuk memastikan siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga dukungan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Untuk memastikan program berjalan optimal, Dispendik perlu melaksanakan evaluasi berkala guna mengukur efektivitas dan dampak program. Selain itu, transparansi dalam penyusunan laporan tentang alokasi anggaran dan capaian program sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah. Terakhir, Dispendik dapat mengadakan kampanye kesadaran di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, program beasiswa, dan pembebasan biaya sekolah.



Kampanye ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan program-program yang telah disediakan oleh pemerintah tanpa kendala informasi.

4.2.2.4. Peningkatan Infrastruktur Rumah Ibadah dan Tempat Pendidikan Agama



Grafik 23. Dana Infrastruktur Keagamaan (Aliandu, 2024)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama melalui alokasi dana hibah yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun (Grafik 23). Pada tahun 2021, hibah yang disalurkan mencapai Rp11 miliar. Jumlah ini hampir dua kali lipat pada 2022, dengan total Rp22,1 miliar. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana total hibah mencapai Rp30,7 miliar, terdiri dari Rp28,4 miliar dari APBD dan Rp2,3 miliar dari P-APBD yang disalurkan kepada 234 lembaga (Aliandu, 2024).

Dana hibah ini dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan sarana prasarana masjid, musala, pondok pesantren, TPQ, dan yayasan pendidikan agama lainnya. Peningkatan anggaran tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan fungsi rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama sebagai pusat pengembangan spiritual dan moral masyarakat Mojokerto.

Untuk meningkatkan efektivitas alokasi dana hibah bagi infrastruktur rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dispendik dapat menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada sistem



pendataan dan prioritas berbasis kebutuhan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa bantuan dana dialokasikan kepada lembaga yang benar-benar membutuhkan. Sistem ini dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses identifikasi dan penyaluran dana secara transparan. Kedua, Dispendik dan instansi terkait dapat menyelenggarakan program pendampingan teknis bagi penerima hibah, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan proyek pembangunan. Pendampingan ini bertujuan agar dana hibah dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku, sehingga hasil pembangunan dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Ketiga, Dispendik dapat memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menambah dukungan terhadap pengembangan rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama. Sinergi ini dapat membantu meningkatkan cakupan penerima manfaat tanpa terlalu membebani APBD, sehingga program ini dapat lebih berkelanjutan.

4.2.3. Mojokerto Makmur

Pada pilar Mojokerto Makmur, fokus diarahkan pada pemberdayaan siswa dari keluarga tidak mampu melalui program beasiswa. Pemerintah Kabupaten Mojokerto meningkatkan alokasi anggaran beasiswa secara signifikan untuk siswa berprestasi di berbagai jenjang pendidikan. Program ini tidak hanya membantu siswa dari segi pembiayaan, tetapi juga mendorong peningkatan prestasi akademik sebagai bagian dari strategi membangun SDM yang produktif.



4.2.3.1 Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu



Grafik 24. Realisasi Anggaran Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024)

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mojokerto merealisasikan anggaran untuk beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan tidak mampu dengan total sebesar Rp 479.175.000. Anggaran ini mencerminkan upaya awal untuk mendukung siswa-siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial agar dapat terus melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan ekonomi. Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi anggaran beasiswa ini, dengan total dana yang dialokasikan melonjak menjadi Rp 1.691.425.000 (Grafik 24). Peningkatan hampir empat kali lipat ini menunjukkan adanya komitmen yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan, sekaligus memperluas cakupan program beasiswa agar dampaknya lebih luas dalam mendukung pendidikan siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren positif dari tahun 2022 hingga 2023 dalam hal alokasi anggaran beasiswa. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 menegaskan adanya upaya nyata untuk memberikan dampak yang lebih luas terhadap keberlanjutan pendidikan siswa tidak mampu (Dispendik Kab. Mojokerto, 2023, 2024).



4.2.3.1. Bukti Konkret Pencapaian Bupati Ikfina dalam Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu

Berdasarkan program prioritas bupati yang telah direncanakan dalam RPJMD, terdapat beberapa langkah dan bukti nyata dari Bupati Mojokerto terhadap pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu. Adapun beberapa contohnya ialah sebagai berikut:

1) Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu di Tahun 2022



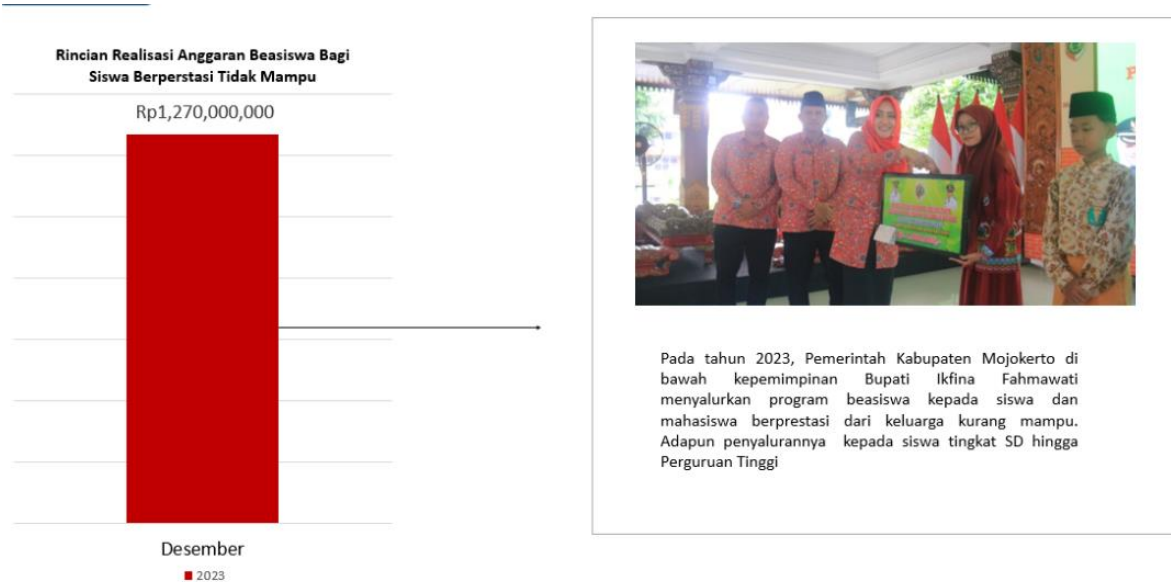
Grafik 25. Rincian Realisasi Anggaran Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu Tahun 2022 (Nurhidayat, 2022; Syaipudin, 2024b)

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu menunjukkan realisasi anggaran yang cukup signifikan (Grafik 25). Pada bulan Oktober, Pemkab Mojokerto berhasil menyalurkan bantuan beasiswa dengan total anggaran sebesar Rp 300 juta kepada 57 siswa dan mahasiswa berprestasi. Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap siswa dan mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi luar biasa, termasuk mereka yang hafal Al-Qur'an. Dalam pernyataannya, Bupati Ikfina menegaskan bahwa beasiswa ini merupakan bentuk dukungan konkret bagi generasi muda untuk terus melanjutkan pendidikan mereka tanpa terkendala masalah ekonomi, sekaligus mendorong tumbuhnya generasi yang unggul dalam prestasi akademik maupun keagamaan. Kemudian, pada bulan Desember 2022, Pemkab Mojokerto kembali menyalurkan bantuan beasiswa dengan total anggaran sebesar Rp 179.175.000 (Nurhidayat, 2022; Syaipudin, 2024b). Penyaluran ini menjadi bagian dari komitmen



berkelanjutan untuk mendukung siswa berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga mahasiswa perguruan tinggi.

2) Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu di Tahun 2023



Grafik 26. Rincian Realisasi Anggaran Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu Tahun 2023
(Diskominfo Mojokerto, 2023)

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan melalui program beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu (Grafik 26). Total realisasi anggaran untuk program ini pada Desember 2023 mencapai Rp 1.270.000.000. Penyaluran beasiswa ini mencakup siswa dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga mahasiswa perguruan tinggi, dengan tujuan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan (Diskominfo Mojokerto, 2023).

Program ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban finansial keluarga penerima, tetapi juga memotivasi para siswa dan mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi mereka. Langkah ini menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan Pemkab Mojokerto terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dengan alokasi anggaran yang signifikan dan distribusi yang tepat sasaran, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.



Untuk meningkatkan efektivitas program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dispendik dapat mempertimbangkan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap mekanisme seleksi penerima beasiswa agar lebih transparan dan berbasis pada kriteria objektif. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, baik dari segi prestasi akademik maupun kebutuhan finansial. Sistem seleksi yang lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya, dapat meningkatkan akuntabilitas dan keadilan dalam distribusi beasiswa.

Kedua, untuk memperluas dampak program, Dispendik dapat menggandeng pihak-pihak terkait seperti pihak swasta, lembaga donor, dan organisasi non-pemerintah yang memiliki komitmen terhadap pendidikan. Kerja sama ini dapat meningkatkan jumlah beasiswa yang tersedia dan memperluas cakupan program, sehingga lebih banyak siswa yang dapat menikmati manfaatnya. Disamping itu, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan skema beasiswa yang lebih bervariasi, seperti beasiswa untuk keahlian teknis dan keterampilan vokasional yang dapat memperluas pilihan bagi siswa yang berprestasi di bidang non-akademik.

Ketiga, Dispendik dapat meningkatkan dukungan kepada penerima beasiswa melalui program pembinaan dan pengembangan kapasitas. Beasiswa yang diberikan tidak hanya sekadar membantu meringankan biaya pendidikan, tetapi juga bisa disertai dengan program pembekalan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Program ini bisa mencakup mentoring, bimbingan belajar, atau seminar motivasi yang berfokus pada pengembangan karakter dan keahlian.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Kabupaten Mojokerto telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama di sektor pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan infrastruktur pendidikan. Salah satu pencapaian utama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rata-rata tumbuh sebesar 0,55% per tahun selama 2021-2023. Percepatan pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong peningkatan umur panjang dan hidup sehat, pendidikan berkualitas, serta standar hidup layak. Upaya ini mendukung visi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif, yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Di sektor pendidikan, partisipasi PAUD berhasil mencapai target RPJMD 2021-2023, menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan anak usia dini. Meskipun demikian, tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih belum sepenuhnya memenuhi target. Peningkatan juga terlihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan, meskipun belum mencapai target 20%. Dalam hal tata kelola, nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menunjukkan performa konsisten yang sangat baik, mencerminkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan. Selain itu, persentase indikator program dan realisasi anggaran secara umum menunjukkan performa tinggi, meskipun terdapat sedikit penurunan pada 2023.

Program prioritas Bupati Mojokerto juga menunjukkan hasil nyata dalam pengelolaan infrastruktur pendidikan, dengan perbaikan kondisi bangunan SD/MI yang meningkat hingga 1248% pada periode 2022-2023. Selain itu, kualitas pendidik terus ditingkatkan dengan peningkatan persentase guru PAUD, SD, dan SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV. Upaya ini mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya kualitas pengajaran. Pemkab Mojokerto juga menunjukkan komitmen besar dalam mendukung siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu melalui program beasiswa. Alokasi anggaran beasiswa terus meningkat secara signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Di samping itu, insentif bagi guru TPQ juga mengalami peningkatan dari Rp200.000 per guru pada tahun 2022 menjadi Rp400.000 pada tahun 2023, sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam mendukung pendidikan agama.



Pada masa pandemi Covid-19, Pemkab Mojokerto memberikan bantuan kuota internet gratis untuk siswa dan guru, yang membantu menjaga keberlanjutan pembelajaran daring. Selain itu, hibah untuk pembangunan dan perbaikan sarana rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama meningkat tajam, mencapai Rp30,7 miliar pada 2023. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah tidak hanya pada pendidikan formal tetapi juga pendidikan berbasis keagamaan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Mojokerto adalah pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih belum sepenuhnya memenuhi target dalam RPJMD. Meskipun tren peningkatan terlihat selama periode 2021-2023, pencapaian ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan dan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Langkah ini penting untuk menjembatani kesenjangan pendidikan antarwilayah, sehingga setiap anak dapat menikmati hak pendidikan yang setara.

Penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2023 menjadi indikasi adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat partisipasi siswa. Faktor-faktor seperti kendala ekonomi, sosial, serta keterbatasan aksesibilitas pendidikan kemungkinan besar berkontribusi pada penurunan ini. Masalah ini memerlukan perhatian khusus untuk mencegah risiko putus sekolah yang dapat berdampak pada keberlanjutan pendidikan di masa depan.

Selain itu, capaian APK Kesetaraan yang masih di bawah target 20% menunjukkan pentingnya pengembangan strategi tambahan untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan non-formal. Kelompok usia produktif yang tidak dapat mengakses pendidikan formal memerlukan program pendidikan alternatif yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka. Ini termasuk pelatihan keterampilan dan program pendidikan kesetaraan yang lebih inklusif dan mudah diakses.

Penurunan kinerja dalam beberapa indikator dan realisasi anggaran pada tahun 2023 juga menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan baik dari sisi implementasi kebijakan, kapasitas anggaran, maupun faktor eksternal seperti dinamika ekonomi atau sosial yang memengaruhi pelaksanaan program. Penurunan ini memerlukan langkah evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada.

Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, masih ada kebutuhan untuk memastikan pemetaan yang lebih detail di daerah-



daerah tertinggal. Wilayah dengan akses pendidikan yang minim harus menjadi prioritas utama agar pembangunan infrastruktur dapat benar-benar mendukung pemerataan pendidikan di seluruh Kabupaten Mojokerto.

Secara keseluruhan, Pemkab Mojokerto telah menunjukkan komitmen nyata dan keberhasilan yang signifikan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, infrastruktur pendidikan yang memadai, serta pemberdayaan pendidik dan siswa. Upaya ini menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Mojokerto, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi strategis ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Berikut rekomendasi berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat memperkuat akses pendidikan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil serta memperluas program beasiswa dan bantuan sosial, untuk mencegah risiko putus sekolah, khususnya bagi kelompok yang rentan secara ekonomi dan geografis.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat mengembangkan program pendidikan kesetaraan yang lebih efektif dengan memberikan pelatihan intensif dan insentif bagi tenaga pendidik di sektor pendidikan non-formal, guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat melakukan pemetaan yang lebih mendetail mengenai kebutuhan pendidikan di wilayah terpencil atau sulit dijangkau. Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan lokasi prioritas bagi pembangunan infrastruktur pendidikan serta program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi lokal.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat lebih maksimal dalam pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-mengajar, baik di tingkat pendidikan formal maupun non-formal. Penyediaan akses terhadap perangkat teknologi dan pelatihan bagi guru



serta siswa untuk mengoptimalkan pembelajaran daring atau blended learning sangat diperlukan, terlebih dengan adanya potensi bencana alam yang dapat mengganggu proses pendidikan.

6. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto perlu mengembangkan kurikulum daerah yang mengangkat dan melestarikan budaya daerah. Kurikulum ini dapat disusun dengan menambahkan materi yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, dan nilai-nilai lokal Mojokerto, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik tetapi juga pemahaman mendalam tentang budaya mereka sendiri. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam memperkuat identitas budaya lokal.
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang mengalami penurunan kinerja, untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan menyusun strategi yang lebih adaptif serta efektif di masa depan.
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat memperkuat sistem evaluasi dan monitoring berbasis data untuk memastikan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan tepat sasaran, serta memantau capaian program secara berkala untuk implementasi perubahan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan pendidikan berkelanjutan.

Peneliti juga telah menambahkan rekomendasi dalam setiap sub-bab indikator agar pembahasan mengenai rekomendasi lebih sesuai dengan konteks indikator. Sebagai penutup, rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan arah strategis bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam menghadapi tantangan di sektor pendidikan. Melalui penerapan rekomendasi ini secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan Kabupaten Mojokerto dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah di bidang pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliandu, K. (2024, October 22). *Pemkab Konsisten Perkuat Infrastruktur Keagamaan*. Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/825223050/pemkab-konsisten-perkuat-infrastruktur-keagamaan>
- Andhika, L. R. (2017). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.
- Aslah, S. (2024, September 2). *Bupati Mojokerto Salurkan Beasiswa 229 Siswa Berprestasi, Ini Rinciannya*. Suara Mojokerto. <https://suaramojokerto.com/2024/09/02/bupati-mojokerto-salurkan-beasiswa-229-siswa-berprestasi-ini-rinciannya/>
- Bappeda Kab Mojokerto. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. <https://satudatapalapa.mojokertokab.go.id/eu/group/rpjmd-2021-2026>
- BNRI News. (2022, August 15). *Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Sediakan Anggaran Puluhan Miliar untuk Rehabilitasi Sekolah*. BNRI News. https://www.bnrinews.com/2022/08/dinas-pendidikan-kab-mojokerto-sediakan_15.html
- BPS Kabupaten Mojokerto. (2021). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2021*.
- Creswell, J. (2013). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches in Research Design*.
- Diskominfo Mojokerto. (2023, December 14). *Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Beasiswa Rp 1,1 Miliar untuk 190 Pelajar dan Mahasiswa*. Pemkab Mojokerto. <https://mojokertokab.go.id/detail-berita/bupati-mojokerto-serahkan-bantuan-beasiswa-rp-11-miliar-untuk-190-pelajar-dan-mahasiswa-1702564133>
- Diskominfo Mojokerto. (2024, April 28). *Hadiri Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, Bupati Ikfina Apresiasi Guru Di Bumi Majapahit*. Pemkab Mojokerto.
- Dispendik Kab. Mojokerto. (2020). *Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2021-2026*. <https://dispendik.mojokertokab.go.id/renstra-dinas-pendidikan-kabupaten-mojokerto-2021-2026/>
- Dispendik Kab. Mojokerto. (2023). *LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2023*.
- Dispendik Kab. Mojokerto. (2024). *LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2024*.
- Dunn, W. (1991). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Englewood Cliffs.
- E.Deepa, E. D., & Dr.S.Kuppusamy, Dr. S. K. (2011). Impact of Performance Appraisal System on Job Satisfaction, Employee Engagement, Organizational Citizenship Behavior and Productivity. *Indian Journal of Applied Research*, 4(2), 4–6. <https://doi.org/10.15373/2249555X/FEB2014/55>
- Hamiruddin. (2021). Survei dan Konsultan Politik: Membangun Popularitas dan Elektabilitas Politik. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 7(1). 10.35673/ajdsk.v7i1.1702
- Hermansyah, F. (2022, November 17). *Insentif Guru TPQ-Madin di Kabupaten Mojokerto Hanya Rp 200 Per Tahun*. Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/nasional/821020087/insentif-guru-tpqmadin-di-kabupaten-mojokerto-hanya-rp-200-per-tahun>
- Inilah Mojokerto. (2022, November 18). *Bupati Ikfina Serahkan Beasiswa 300 Juta ke 57 Pelajar dan Mahasiswa Hafal Al Qur'an*. Inilah Mojokerto. <http://inilahmojokerto.com/2022/10/18/bupati-ikfina-serahkan-beasiswa-300-juta-ke-57-pelajar-dan-mahasiswa-hafal-al-quran/>
- Inilah Mojokerto. (2024, September 12). *Orientasi 210 Tenaga Pendidik PPPK Kabupaten Mojokerto, Ini Pesan Bupati Ikfina*. Inilah Mojokerto.



- <https://inilahmojokerto.com/2024/09/12/orientasi-210-tenaga-pendidik-pppk-kabupaten-mojokerto-ini-pesan-bupati-ikfina/>
- Kemdikbud. (2024). *Rapor Pendidikan Indonesia Kabupaten Mojokerto Tahun 2024*. <https://data.kemdikbud.go.id/>
- Magriasti, L. (2011). ARTI PENTING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH: ANALISIS DENGAN TEORI SISTEM DAVID EASTON. In *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*.
- Maki, H. A., Gunawan, G., Sauri, S., & Handayani, S. (2022). Pola Hubungan Kebijakan Dan Pembangunan Pendidikan Dan Kebudayaan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1124. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1023>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2014). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Nurhidayat, T. (2022, October 19). *Pemkab Mojokerto Gelontor Beasiswa Senilai Rp 300 Juta*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/432956/pemkab-mojokerto-gelontor-beasiswa-senilai-rp-300-juta>
- Oceananda, I. (2023a, August 26). *Dispendik Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina Beri Beasiswa ke Pelajar Berprestasi*. Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/pendidikan/822880927/dispndik-kabupaten-mojokerto-bupati-ikfina-beri-beasiswa-ke-pelajar-berprestasi>
- Oceananda, I. (2023b, November 2). *Dispendik Kabupaten Mojokerto, Sambut Tahun Ajaran Baru, Belasan Proyek Rehab Sekolah Rampung*. Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/pendidikan/823209726/dispndik-kabupaten-mojokerto-sambut-tahun-ajaran-baru-belasan-proyek-rehab-sekolah-rampung>
- Patton, M. Q. (2008). *Understanding the Implementation of a Complex Intervention Aiming to Change a Health Professional Role: A Conceptual Framework for Implementation Evaluation* (4th ed.). Sage Publications.
- Pemkab Mojokerto. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2022*.
- Prihatini, M. (2023, December 15). *Pemkab Mojokerto Kucurkan Bantuan Beasiswa Senilai Total Rp1,1 miliar*. Berita Jatim. <https://beritajatim.com/pemkab-mojokerto-kucurkan-bantuan-beasiswa-senilai-total-rp11-miliar>
- Purba, S. (2010). PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI SEKTOR PENDIDIKAN. *Semantic*.
- Ridwan, I. R. (2016). KETERKAITAN PENDIDIKAN DENGAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM). *Jurnal Geografi Gea*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1677>
- Ripley, R., & Franklin, G. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press.
- Romadoni, M. (2024a, July 17). *Perbaikan Infrastruktur Sekolah di 2024 Disokong APBD Pemkab Mojokerto Senilai Rp 20,7 Miliar*. Surabaya Tribunnews. <https://surabaya.tribunnews.com/2024/07/17/perbaikan-infrastruktur-sekolah-di-2024-disokong-apbd-pemkab-mojokerto-senilai-rp-207-miliar>
- Romadoni, M. (2024b, September 3). *Pengerjaan Rehab Gedung Sekolah Mojokerto Capai 50 Persen, Ada 2 Sekolah Sudah Tuntas*. Tribun Mojokerto. <https://jatim.tribunnews.com/2024/09/03/pengerjaan-rehab-gedung-sekolah-mojokerto-capai-50-persen-ada-2-sekolah-sudah-tuntas>
- Suara Mojokerto. (2020, September 3). *85 Ribu Siswa SD dan SMP Negeri di Mojokerto Bakal Dapat Kuota Internet Untuk Belajar Daring*. Suara Mojokerto.



- <http://suaramojokerto.com/2020/09/03/85-ribu-siswa-sd-dan-smp-negeri-di-mojokerto-bakal-dapat-kuota-internet-untuk-belajar-daring/>
- Surabaya Pagi. (2023, December 21). *Bupati Ikfina Serahkan Bansos Insentif Guru TPQ*. Surabaya Pagi. <https://surabayapagi.com/read/bupati-ikfina-serahkan-bansos-insentif-guru-tpq>
- Syaifudin, N. (2024, July 13). *Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan, 12 Lembaga Pendidikan Mojokerto Bakal Direnovasi*. Bangsa Online. <https://www.bangsaonline.com/berita/134438/komitmen-tingkatkan-mutu-pendidikan-12-lembaga-pendidikan-mojokerto-bakal-direnovasi>
- Syaipudin, L. (2024a, July 14). *Pelajar SD hingga Mahasiswa Perguruan Tinggi Warga Mojokerto Dapat Beasiswa Pemkab 2024 Rp 1,05 Miliar*. Pikiran Rakyat Jatim. <https://jatim.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-3748325690/pelajar-sd-hingga-mahasiswa-perguruan-tinggi-warga-mojokerto-dapat-beasiswa-pemkab-2024-rp-105-milyar?page=all>
- Syaipudin, L. (2024b, July 17). *Pelajar SD hingga Mahasiswa Perguruan Tinggi Warga Mojokerto Dapat Beasiswa Pemkab 2024 Rp 1,05 Miliar*. Pikiran Rakyat Jatim. <https://jatim.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-3748325690/pelajar-sd-hingga-mahasiswa-perguruan-tinggi-warga-mojokerto-dapat-beasiswa-pemkab-2024-rp-105-milyar?page=all>
- Taufiqurokhman, T., Satispi, E., Murod, M., Izzatusholekha, I., Andriansyah, A., & Samudera, A. A. (2023). *KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMAJUKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL*. *SWATANTRA*, 21(2), 189. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.2.189-205>
- Zulyanto, A. (2022). *Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 32–40. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.23385>